



**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN
(UPK) KECAMATAN PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

*The Influences Of Accountability and Transparency To The Performance
of Activity Management Unit (UPK) Sub-District
At National Program For Society Empowerment – Rural Area
(PNPM-Mandiri Perdesaan) At Situbondo Regency*

TESIS

Oleh

**Drs. Hari Susanto
NIM 100920101001**

**KOSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN DI
KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi (S2)
Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Drs. Hari Susanto
100920101001

**KOSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. ayahanda Hasan (alm.) dan Ibunda Muljati (almh.) yang ku banggakan, dengan segala hormat aku sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas untaian do`a serta kasih sayangnya dalam mengantarku pada keberhasilan;
2. kakakku Rusbandijah dan Fadlah serta adikku Sjaiful Chodri dan Dolok Sukamto (alm.) yang kubanggakan dan aku sayangi;
3. istriku Yeni Nurdiana yang selalu mendampingi dalam setiap aktifitas hidupku;
4. anakku Siti Hasanah Nurul Karimah, Muhammad Hanif Al-Ghiffari Hasan dan Muhammad Hanif Hanzalah Al-Ghazwani, amanah Allah yang selalu menjadi motivator hidupku;
5. rekan-rekanku seperjuangan terimakasih atas selalu dukungannya;
6. almamater yang ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS An-Nissa:58)^{*)}

'Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.'" (H.R. Muslim).^{**)}

^{*)} Transliterasi Juz 1-5, 2009, Ar-Rahmah, Alqur'an dan Terjemahannya, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

^{**)} HR Bukhari no. 5188 dan Muslim no. 4828, <https://www.facebook.com/Telaga.Mutiara.102/posts/438847939526185>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Drs. Hari Susanto

NIM : 1009201010001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul: "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2015
Yang menyatakan,

Drs. Hari Susanto
NIM 1009201010001

PERSETUJUAN

Tesis berjudul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo" telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 15 Januari 2015

waktu : 08.30 – 11.20 WIB

tempat : Ruang Uji Pascasarjana - FISIP Universitas Jember.

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP 19520727 198103 1 003

Drs. Supranoto, M.Si.

NIP 19610213 198802 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Ketua Program Studi Magister
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, SE, M.Si

NIP 19790220 200212 2 001

PENGESAHAN

Tesis berjudul ” Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 15 Januari 2015

waktu : 08.30 – 11.20 WIB

tempat : Ruang Uji Pascasarjana - FISIP Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua Penguji

Anggota Penguji I

Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si
NIP 19580510 198702 2 001

Dr.Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, SE, M.Si
NIP 19790220 200212 2 001

Anggota Penguji II

Anggota III

Drs. Supranoto, M.Si
NIP 19610213 198802 1 001

Prof. Dr. Hary Yuswadi,MA
NIP 19520727 198103 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi,MA
NIP 19520727 198103 1 003

ABSTRACT

This research aims to examine the influences of accountability and transparency to the performance of Activity Management Unit (UPK) sub-district at National Program for Society empowerment – rural area (PNPM-Mandiri Perdesaan) at Situbondo regency. This research is explanation research with qualitative approach. The population of this research is Activity Management Unit (UPK) Sub-district at National Program for Society Empowerment – rural area at Situbondo regency. The unit of analysis is the organization hence the samples that are determined are organizational structure; chairman, secretary, and treasurer. Furthermore, the analysis is based on Total Sampling Method.

In this research, nonparametric statistical method is used to analyze the data because the data which are taken from the questionnaire are ordinal data. However, interval data are needed to analyze the data so they are transformed into interval scales using “Successive Interval Method”. Regression Analysis Model is also used to analyze the data in this research. The data are collected by spreading the questionnaire directly to the respondents. The data used in this research are taken from primary data which are collected from the questionnaires. The questionnaires are spread to the Activity Management Unit (UPK) sub-district Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Jangkar, and Banyuputih. Furthermore, the primary data are processed with SPSS ver.15 program.

The results of this research show that accountability and transparency simultaneously have positive impacts to the performances of Activity Management Unit (UPK) sub-district at National Program for Society Empowerment – rural area (PNPM-Mandiri Perdesaan) at Situbondo regency.

Keywords: accountability, transparency, performance. Activity Management Unit (UPK)

RINGKASAN

Pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *good governance* di antaranya transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian di semua kalangan, termasuk yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik meningkatkan keberhasilan organisasinya. Hal ini juga dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dengan harapan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi mampu meningkatkan kinerja organisasinya pada program nasional tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan besarnya pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi secara parsial maupun bersama-sama terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adapun dimensinya adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan maupun akuntabilitas finansial.

Sedangkan transparansi adalah bentuk kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik/umum dari pemerintah maupun organisasi sektor publik. Pelaksanaan transparansi harus didukung oleh sarana seperti adanya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, pembiayaan pada setiap rencana dan kegiatan PNPM-MPd di masyarakat, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan dan meningkatkan arus informasi.. Sedangkan kinerja organisasi merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja organisasi yang berorientasi

pada hasil di dalamnya menyangkut indikator produktifitas, kepuasan, kualitas layanan, responsibilitas dan keadilan. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory survey*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Sedangkan rancangan uji hipotesis untuk membuktikan besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat digunakan teknik statistik parametrik yaitu analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo secara simultan adalah sebesar 0,385 dengan signifikasi 0,000. Secara parsial besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,177 dengan nilai signifikasi 0,020, sedangkan pengaruh transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,394 dengan nilai signifikasi 0,010. Besarnya perubahan variabel kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan transparansi.

PRAKATA

Alhamdulillah rabbi'alaamiin, sangat patut apabila penulis memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. atas terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo”. Hal ini semuanya semata-mata hanya karena berkat rahmat, taufiq serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari Dosen Pembimbing, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang sangat berharga dan sarat akan sentuhan nilai-nilai akademik.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Drs. Mohamad Hasan, M. Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
2. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan FISIP Universitas Jember, yang telah membantu selama mengikuti Program Magister;
3. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember;
4. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang telah membantu selama mengikuti Program Magister;
5. para dosen pengajar pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi yang dengan penuh kesabaran memberikan ilmu bagi kami mahasiswa dalam memperdalam Ilmu Administrasi;

6. seluruh staf administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama mengikuti perkuliahan;
7. Drs. H. Achmad Djunaedi, M.Si., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo beserta seluruh staf dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) di kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini;
8. saudara-saudara Fasilitator Kabupaten (Faskab) pada PNPM di Kabupaten Situbondo beserta seluruh staf administrasi, termasuk rekan-rekan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM MPd di Kabupaten Situbondo yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini;
9. rekan-rekan kerja dan rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah memberi dorongan semangat dan dorongan, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada yang berminat membacanya, di samping itu semoga Allah SWT. Memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan ini, baik langsung maupun yang tidak langsung. Amin.

Situbondo, Januari 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR MOTTO	iii
LEMBAR SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR ABSTRACT	vii
LEMBAR RINGKASAN	viii
LEMBAR PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Akuntabilitas, Trnsparansi dan Kinerja	
Organisasi	21
2.1.1 Akuntabilitas	21
2.1.2 Transparansi	26
2.1.3 Pengertian Kinerja Organisasi.....	29
2.1.3.1 Penilaian Kinerja.....	32
2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja.....	33
2.2 Akuntabilitas dan Transparansi pada PNPM Mandiri	
Perdesaan	35
2.3 Pengaruh Antarvariabel Penelitian	37

2.3.1 Pengaruh variabel akuntabilitas dan kinerja organisasi...	37
2.3.2 Pengaruh variabel transparansi terhadap kinerja organisasi	38
2.3.3 Pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja organisasi	39
2.4 Penelitian Terdahulu	39
2.5 Kerangka Konseptual	42
2.8 Hipotesis	43
BAB 3 METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Satuan Analisis dan Obyek Penelitian	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	48
3.4.1 Populasi	48
3.4.2 Sampel.....	48
3.5 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel ...	49
3.5.1 Identifikasi Variabel	49
3.5.2 Definisi Operasional Variabel	50
3.6 Teknik Pengukuran Variabel.....	56
3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabelitas	57
3.7.1 Uji Validitas	57
3.7.2 Uji Reliabelitas	58
3.8 Metode Transformasi Data	59
3.9 Uji Asumsi Klasik.....	60
3.10 Analisis Regresi Berganda.....	63
3.11 Uji Hipotesis.....	64
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Deskripsi Penelitian.....	67
4.1.1 Latar Belakang PNPM Mandiri.....	67
4.1.2 Kronologis Pembentukan PNPM Mandiri	68
4.1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan PNPM.....	71

4.1.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (<i>Rural PNPM</i>).....	73
4.1.5 UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan	79
4.1.6 Tugas Pengurus Harian dan Struktur UPK Kecamatan PNPM-MPd	82
4.2 Karakteristik Responden	89
4.3 Statistik Diskriptif Variabel Penelitian	91
4.3.1. Akuntabilitas	92
4.3.2. Transparansi	98
4.3.3. Kinerja UPK Kecamatan.....	101
4.4 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabelitas	105
4.5 Hasil Transformasi Data	107
4.6 Uji Asumsi Klasik	108
4.6.1 Uji Normalitas	108
4.6.2 Uji Multikolinieritas	111
4.6.3 Uji Autokorelasi	112
4.6.4 Uji Heterosdatisitas	113
4.7 Analisis Regresi Linier Berganda	114
4.8 Uji Hipotesis	116
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran.....	124
DAFTAR BACAAN	127
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Lokasi, jumlah kecamatan dan desa PNPM-MPd di Situbondo	7
1.2 Pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan di Situbondo	8
2.1 Review penelitian terdahulu	40
3.1 Operasional Variabel	51
3.2 Indeks kriteria reliabilitas	59
4.1 Dana Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo Tahun 2001 – 2013	86
4.2 Identifikasi Responden	88
4.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	89
4.4 Umur Responden	90
4.5 Jenis Kelamin dan Jabatan Responden	91
4.6 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas hukum dan kejujuran	92
4.7 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas manajerial	94
4.8 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas program	95
4.9 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas kebijakan	96
4.10 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas financial	97
4.11 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, pembiayaan pada setiap rencana dan kegiatan PNPM-MPd di masyarakat	99
4.12 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Kemudahan akses informasi	99
4.13 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub	

	Menyusun suatu mekanisme pengaduan	100
4.14	Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Meningkatkan arus informasi.....	100
4.15	Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub produktifitas	102
4.16	Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub kepuasan	103
4.17	Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub kualitas layanan	103
4.18	Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub responibilitas	104
4.19	Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub keadilan	104
4.20	Rekapitulasi Hasil Uji Validitas masing masing variabel	105
4.21	Rekapitulasi hasil Uji Reliabilitas masing-masing variabel.....	107
4.22	Hasil transformasi skala ordinal ke nilai berskala interval variabel akuntabilitas (X_1).....	107
4.23	Hasil transformasi skala ordinal ke nilai berskala interval variabel transparansi (X_2).....	108
4.24	Hasil transformasi skala ordinal ke nilai berskala interval variabel kinerja UPK (Y)	108
4.25	Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	110
4.26	Hasil Perhitungan Diagnostik Kolinieritas.....	111
4.27	Hasil Perhitungan Pengujian D-W	112
4.28	Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda	114
4.29	Hasil Perhitungan Uji F.....	116
4.30	Hasil Uji t	118

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	42
4.1	Histogram dan Normal P-Plot	109
4.2	Kriteria pengujian autokorelasi	113
4.3	Hasil Olah SPSS Uji Heteroskedastisitas	114
4.4	Kurva hasil Uji t dua variabel akuntabilitas terhadap Kinerja UPK	119
4.5	Kurva hasil Uji t dua variabel transparansi terhadap Kinerja UPK	119

DAFTAR LAMPIRAN

- A Surat Pengantar dan Kuesioner
- B Rekapitulasi Data Variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja UPK
- C Deskripsi Variabel Penelitian
- D Nilai validitas masing-masing variabel penelitian
- E Nilai reliabilitas masing-masing variabel penelitian
- F Tabel hasil perhitungan MSI masing-masing variabel
- G Hasil perhitungan uji asumsi klasik dan regresi variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK
- H Piagam Penghargaan kepada UPK Kecamatan yang berprestasi
- I SK Bupati
- J Daftar Tabel F, table t
- K Surat Ijin dan Rekomendasi



**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN
(UPK) KECAMATAN PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN SITUBONDO**

*The Influences Of Accountability and Transparency To The Performance
of Activity Management Unit (UPK) Sub-District
At National Program For Society Empowerment – Rural Area
(PNPM-Mandiri Perdesaan) At Situbondo Regency*

TESIS

Oleh

**Drs. Hari Susanto
NIM 100920101001**

**KOSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
KECAMATAN PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN DI
KABUPATEN SITUBONDO**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi (S2)
Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Drs. Hari Susanto
100920101001

**KOSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

7. ayahanda Hasan (alm.) dan Ibunda Muljati (almh.) yang ku banggakan, dengan segala hormat aku sampaikan terima kasih yang tak terhingga atas untaian do`a serta kasih sayangnya dalam mengantarku pada keberhasilan;
8. kakaku Rusbandijah dan Fadlah serta adikku Sjaiful Chodri dan Dolok Sukamto (alm.) yang kubanggakan dan aku sayangi;
9. istriku Yeni Nurdiana yang selalu mendampingi dalam setiap aktifitas hidupku;
10. anakku Siti Hasanah Nurul Karimah, Muhammad Hanif Al-Ghiffari Hasan dan Muhammad Hanif Hanzalah Al-Ghazwani, amanah Allah yang selalu menjadi motivator hidupku;
11. rekan-rekanku seperjuangan terimakasih atas selalu dukungannya;
12. almamater yang ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS An-Nissa:58)^{*)}

'Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.'" (H.R. Muslim).^{**)}

^{*)} Transliterasi Juz 1-5, 2009, Ar-Rahmah, Alqur'an dan Terjemahannya, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

^{**)} HR Bukhari no. 5188 dan Muslim no. 4828, <https://www.facebook.com/Telaga.Mutiara.102/posts/438847939526185>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran bersifat multidimensional, dalam arti bahwa kedua masalah tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga menjadi suatu permasalahan yang penting untuk ditanggulangi pada saat ini di Indonesia. Oleh karena permasalahan tersebut merupakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk menanganinya, maka selayaknya pemerintah mengupayakan berbagai macam cara di antaranya mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, seperti misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui ekspor (migas dan nonmigas) serta investasi; menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja; merevitalisasi bidang pertanian, perikanan, kelautan dan ekonomi pedesaan. Kesemuanya melibatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran di lingkungan sekitarnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui beberapa kebijakan dalam menangani permasalahan kemiskinan dan pengangguran ternyata hasilnya tidak sia-sia, yakni terdapat penurunan pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dijelaskan oleh Berita Statistik BPS No 35/05/Th.XVI, 6 Mei 2013 (dalam <http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/119-perkem-bangan-ekonomi-terkini-2013-ii>) bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2013 mengalami kenaikan terutama di sektor perdagangan, tercatat naik sebesar 3,29%. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor konstruksi juga mengalami peningkatan dibandingkan Februari tahun sebelumnya, tumbuh sebesar 12,95%, yang bekerja di sektor industri juga meningkat sebesar 4,01%. Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia, jumlah penduduk miskin turut berkurang. Berdasarkan data terbaru dari BPS, penduduk miskin di Indonesia pada September 2012 sebanyak 28,59 juta orang turun dibandingkan pada Februari 2004 yang mencapai 36,1 juta orang. Jika dibandingkan dengan

jumlah penduduk miskin pada Maret 2012, maka selama satu semester berikutnya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,54 juta orang.

Data di atas mengisyaratkan bahwa jumlah pengangguran berkurang terjadi pada sektor industri, perdagangan dan sektor konstruksi dan terjadi penurunan angka kemiskinan selama dalam waktu 8 tahun. Ini berarti bahwa Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga yang diperlukan pada bidang-bidang industri, perdagangan dan sektor konstruksi, karena terdapat fenomena bahwa pola pembangunan bukan lagi pada sektor pertanian namun sudah menuju kearah industrialisasi.

Di tingkat regional, seperti yang dijelaskan oleh Soekarwo, jumlah penduduk miskin Jatim sejak 2009 terus mengalami penurunan per Maret tahun 2009, dari sebesar 6,022 juta jiwa menjadi 5,356 juta jiwa. Tahun 2011 dan per Maret 2012 turun kembali menjadi 5,071 juta jiwa turun secara absolut sebesar 285,23 ribu jiwa. Atau secara keseluruhan sejak Maret 2009 secara akumulatif penurunan penduduk miskin di Jatim mencapai 3,28 persen. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2012 mencapai 4,14 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2011 (4,16 persen) dan TPT Februari 2011 (4,18 persen), sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 69,49 prosen pada Agustus 2011 menjadi 69,55 prosen Februari 2012. (<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79dfd9f9305b81298296201a5c4bdb0c8cc0f4caced8e59c4c560>, Jumat, 19 Oktober 2012)

Pernyataan di atas dengan tegas menginformasikan bahwa jumlah tingkat kemiskinan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami penurunan, begitu juga dengan tingkat pengangguran, apalagi terdapat kenaikan pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Data pendukung lainnya menjelaskan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang relatif bagus dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi ini juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012. Hal ini karena berbagai macam program kerja termasuk di antaranya adalah suksesnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Selain itu, pemerintah propinsi Jawa Timur juga berhasil dalam memperluas penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar

negeri. (<http://www.surabayapagi.com/index.php?read~DPRD-Acungi-Jempol-Turunnya-Penduduk-Miskin;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829625323ea8c06c10547522f9e4d79c1332c>, Senin, 28 April 2014). Keterangan di atas menyatakan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran semakin menurun.

Ketiga uraian di atas menyimpulkan bahwa menurunnya jumlah angka kemiskinan dan pengangguran juga tidak terlepas dengan adanya pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat yakni untuk mengatasi masalah-masalah yang multidimensi seperti halnya kemiskinan dan pengangguran. Sumodiningrat (2007) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencakup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang diterapkan di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan, masyarakat desa hutan, masyarakat pesisir pantai, termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) beserta keberhasilannya.

Beberapa cara yang dilakukan pada perbaikan kualitas sumber daya untuk memberdayakan masyarakat miskin, yakni melalui kegiatan sosial ekonomi yang didukung kebijakan pemerintah. Salah satu kegiatan tersebut misalnya dengan menciptakan program pemberdayaan yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendidikan beserta pada pola dan sistem pembangunannya pada masyarakat. Upaya lain yang dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran adalah mendorong pihak swasta/BUMN maupun organisasi publik guna melakukan segala aktifitas pinjaman uang atau modal guna membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat.

Mencermati masalah dan fenomena pengangguran dan kemiskinan ini, perlu menggunakan sudut pandang kelembagaan, bahwa kemiskinan dan pengangguran tersebut terjadi karena lemahnya penerapan institusi. Penyebab kemiskinan dan pengangguran yang terjadi sesungguhnya bukanlah dari faktor manusianya saja, namun disebabkan oleh lemahnya memahami serta melaksanakan perangkat institusi yang tertulis berupa aturan perundang-undangan, maupun institusi yang tidak tertulis seperti halnya kebiasaan serta perilaku di masyarakat. Oleh karenanya, perlu upaya perbaikan melalui berbagai macam program pemberdayaan, yang bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran serta melaksanakan dan meningkatkan peran kelembagaan yang lebih baik, sehingga mampu mengubah perilaku dan kebiasaan di masyarakat serta lebih memahami dan melaksanakan institusi tertulis lainnya. Dengan demikian diharapkan warga masyarakat akan mampu mandiri dan mengelola potensi sumber daya alam beserta sumber daya manusia di sekitarnya.

Upaya untuk melaksanakan institusi yang lebih baik melalui program pemberdayaan harus juga didukung tata kelola yang baik (*good governance*) secara professional. Praktek tata kelola kelembagaan yang buruk (*bad governance*) dan pengabaian pentingnya kelembagaan akan mengakibatkan segala upaya mengatasi problem pemberdayaan masyarakat mengalami kegagalan, seperti program pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran menjadi tidak efektif.

Banyak dijumpai kebijakan atau program-program pemerintah yang bagus karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ketika pengelolaan kelembagaan dan tata kelolanya buruk, akibatnya program tersebut tidak berhasil seperti yang telah direncanakan. Sumarto (dalam **Prasetyo**, 2006) menegaskan bahwa praktek pemerintahan yang buruk (*bad governance*) telah mengakibatkan upaya untuk mengatasi problem kemiskinan menjadi tidak efektif, sementara di lain pihak program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan justru menjadi lahan munculnya praktek-praktek korupsi. Dapat dikatakan bahwa operasional organisasi/pemerintahan dengan praktek tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan salah satu cara yang sangat diperlukan (mutlak) dalam

upaya keberhasilan suatu program, di antaranya pemberdayaan masyarakat seperti halnya mengatasi kemiskinan serta mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pada proses pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejak adanya program pemerintah terkait masalah pengentasan kemiskinan tersebut, maka kemudian secara berturut-turut muncul beberapa macam program yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Program-program serta kebijakan ini semakin menemukan relevansinya ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, hal mana berdampak pada meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan serta berdampak jumlah kemiskinan bertambah.

Salah satu contoh program yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Program ini lebih menekankan pada penguatan sistem pengelolaan kepentingan publik di tingkat lokal. Untuk selanjutnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diadopsi sepenuhnya oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Widodo (2002) menjelaskan secara lebih khusus kegiatan-kegiatan dalam PPK ditujukan untuk:

- 1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya kelompok miskin dan perempuan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) meningkatkan penyediaan prasarana sosial ekonomi masyarakat pedesaan;
- 4) Memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok miskin di pedesaan;
- 5) Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan melestarikan pembangunan di pedesaan serta mengakses sumber daya yang tersedia;
- 6) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan di pedesaan;
- 7) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pembangunan di desa atau antar desa.

Program pemberdayaan yang menekankan untuk menanggulangi kemiskinan ini akhirnya terproses menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan di pedesaan, penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terlaksananya *good governance*. PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri adalah salah satu program pemerintah yang berupaya dalam hal peningkatan pemberdayaan (*empowerment*) pada masyarakat miskin di desa.

Dalam kegiatannya, PNPM Mandiri Perdesaan telah memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan, selanjutnya keberlanjutan dari penguatan tersebut akhirnya ditentukan oleh terintegrasinya proses, mekanisme dan tata kelola perencanaan pembangunan di daerah. Rencana pembangunan masyarakat yang difasilitasi PNPM Mandiri diintegrasikan dengan perencanaan reguler (satu desa/kelurahan, satu rencana) agar diakomodasi oleh kabupaten/kota. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat upaya mengentaskan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pedesaan.

Secara umum, ada tiga bidang utama yang dilakukan oleh PNPM Mandiri ini yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. (Sukidjo, 2009) dan (http://www.pnpm-Mandiri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=324). Untuk bidang ekonomi, terdapat pemberian pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang memiliki usaha kecil. Pinjaman itu dijadikan modal yang berputar dan akan dikembalikan lagi nantinya. Kedua, dalam bidang sosial, ini lebih kepada pemberian pelatihan kepada masyarakat agar memiliki keahlian seperti pelatihan menjahit, ini juga disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan desa tersebut. Ketiga adalah bidang lingkungan, yakni berupa pembetulan sarana dan prasarana di desa, seperti pembangunan jalan kecil, irigasi, ketersediaan air bersih,

MCK, ketersediaan tempat sampah, jembatan dan lain sebagainya. Program ini dilakukan untuk memancing masyarakat desa agar bisa berusaha lebih giat lagi dalam bekerja, berekonomi dan bergotong royong sesama masyarakat di desa. Program ini menumbuhkan kepedulian sesama masyarakat, saling bekerjasama dalam membangun desa serta meningkatkan partisipasi masyarakatnya secara bersama-sama.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Perdesaan atau *Rural* PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat pendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat pedesaan. Program pemberdayaan ini menjadi program nasional, termasuk Kabupaten Situbondo yang melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan PNPM di Kabupaten Situbondo dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga saat ini, dari 17 kecamatan, lokasi PNPM-Mandiri Perdesaan sampai saat ini terdiri dari 13 kecamatan, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Lokasi, jumlah kecamatan dan desa PNPM-MPd di Situbondo

NO.	Lokasi	Tahun dan jumlah lokasi								
		2001	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kecamatan	3	3	3	3	5	6	10	13	13
2.	Desa	28	28	28	28	44	52	81	106	106
3.	Desa Terdanai	22	27	27	28	44	51	79	103	99

Sumber: Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo (2012:8)

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa lokasi (kecamatan, desa dan desa terdanai) dari tahun 2001 hingga tahun 2011 semakin lama jumlahnya meningkat, ini berarti bahwa program PNPM-MPd tersebut sangat dibutuhkan serta mempunyai manfaat bagi masyarakat di Situbondo. Begitu pula pada pemanfaat program, sejak tahun 2007 hingga 2011 jumlah pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan dan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Pemanfaat PNPM Mandiri Perdesaan di Situbondo

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	RTM
2007	11.771	10.393	22.164	13.553
2008	13.242	12.698	25.940	17.080
2009	20.315	19.212	39.527	23.995
2010	46.600	33.436	80.036	53.729
2011	56.603	63.387	119.990	74.721
JUMLAH	148.531	139.126	287.657	183.078

Sumber: Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo (2012:15)

Meskipun jumlah lokasi dan pemanfaat PNPM semakin meningkat dirasakan manfaatnya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011, namun kinerja PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo selalu ditingkatkan untuk menuju yang lebih baik, sesuai dengan tujuan program. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pada pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat terutama bagi pelaku pelaksanaan program kegiatan desa. Selain itu diperlukan keselarasan dan pemahaman yang sama dalam pengelolaan dana pembangunan agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan baik.

Di tingkat kecamatan peran pelaku pelaksana program khususnya Lembaga Operasional Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan masih perlu adanya peningkatan komitmen dan kapasitas sehingga pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang berupa kegiatan sarana prasarana perlu ada tindak lanjut untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan sehingga kegiatan sarana prasarana tersebut tetap bisa difungsikan dan terpelihara dengan baik. Perlu inventarisasi kegiatan sarana prasarana yang sudah dilaksanakan dan dikordinasikan dengan dinas instansi terkait yang menangani program pemberdayaan ini. (Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, 2012:28).

Upaya yang dilakukan PNPM-MPd salah satunya menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan peran serta pada pemberdayaan masyarakat. Tolak ukur bahwa pemberdayaan masyarakat memberikan hasil nyata adalah telah terjadinya pengorganisasian

masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan partisipatif, sehingga muncul kesadaran dan kepedulian untuk menemukan potensi dan masalahnya sendiri, serta meningkatkan pengembangan individu, kelompok dan kelembagaan.

Adanya peningkatan potensi yang dirasakan oleh pemanfaat program /pelaku pelaksanaan program PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo dapat dijadikan indikator bahwa program tersebut sangat berguna bagi peningkatan pola hidup warga masyarakat khususnya pada tingkat kesejahteraan kehidupannya sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa PNPM-MPd mempunyai tujuan yang positif dalam hal percepatan program pemberdayaan khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan berkelanjutan dengan sistem *Bottom Up*, artinya bahwa program ini direncanakan dari masyarakat paling bawah dengan melibatkan semua unsur-unsur masyarakat yang mengacu pada kebutuhan riil dengan memprioritaskan manfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM).

Melalui PNPM-MPd, masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam setiap kegiatan partisipasi pembangunan di desanya. Mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai pada upaya pemeliharannya. Jenis-jenis kegiatan PNPM-MPd yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal) kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di lokasi PNPM-MPd, dengan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD) maka dibentuklah lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan yang

dinamakan **Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM-MPd**. Lembaga ini berfungsi mengoperasikan PNPM-MPd kecamatan di Kabupaten Situbondo di antaranya mengelola dana PNPM baik dana untuk infra struktur ke masyarakat dan dana pinjaman bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marjinal serta tetap melibatkan peran serta masyarakat secara umum. UPK Kecamatan adalah organisasi sektor publik karena bergerak dalam pelayanan publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan menjadi milik publik atau milik negara. (Mahmudi, 2011:3)

Peran UPK pada Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa di kecamatan serta membantu BKAD dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Di sinilah peran BKAD dan khususnya UPK sebagai lembaga operasional pengelolaan keuangan dan pembangunan harus mampu melaksanakan prinsip-prinsip PNPM dan *good governance* agar sehingga tujuan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pertimbangan dan alasan yang logis penulis memilih penelitian pada UPK Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo, karena di Situbondo terdapat beberapa UPK kecamatan yang pernah meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai UPK PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional dengan kategori A yakni keberhasilannya di tingkat nasional dan propinsi, UPK yang dimaksud adalah UPK PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Panji, Sumbermalang dan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Khusus UPK Kecamatan Banyuputih mendapatkan beberapa penghargaan antara lain adalah.

- a) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPd Kecamatan Banyuputih mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai UPK PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional dengan kategori A pada 23 Juni 2009.
- b) Pada 27 Oktober 2009, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Banyuputih menerima piagam penghargaan tingkat nasional dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, sebagai UPK terbaik atas keberhasilannya mengelola dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) dan kelompok Simpan Pinjam khusus

- Perempuan (SPP) (<http://pemberdaya-masyarakat.blogspot.com/2011/06/spp-desa-sumberanyar-berakit-rakit-ke.html>).
- c) Penganugerahan penghargaan sebagai UPK terbaik bagi UPK Banyuputih juga diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam acara Malam Penganugerahan *Pro Poor Award* Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.
 - d) Faktor lain yang tak kalah penting dan dapat dikatakan sebagai akseleran adalah adanya audit dari pihak internal dan eksternal program. Termasuk dari inspektorat kabupaten, DPRD Kabupaten Situbondo, BPKP, satker provinsi, RMU, hingga NMC (*National Management Consultant*) telah melaksanakan audit di Kecamatan Banyuputih. Bahkan, tim dari World Bank International dan *World Bank Indonesia* telah melaksanakan audit forensik pada 13-15 Mei 2012. (<http://pemberdaya-masyarakat.blogspot.com/2012/06/dampak-audit-di-kecamatan-banyuputih.html>).

Data di atas menjelaskan bahwa standar keberhasilan pada kinerja UPK PNPM-MPd di Kecamatan Sumbermalang, Panji dan Banyuputih Kabupaten Situbondo tersebut karena dianggap telah memenuhi angka penilaian dari aspek operasional, aspek perangkat kelembagaan, serta aspek pelayanan. Selain membangun program fisik, juga untuk menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakan agar mampu mengakses manfaat program fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Terkait dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, UPK sebagai pelaksana mandat Badan Kerjasama Antar Desa yang diputuskan melalui Forum MAD agar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tetap berdasarkan pada aturan dan ketentuan PNPM-MPd yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Organisasi (PTO). Dengan demikian keberadaan BKAD dengan lembaga-lembaga operasionalnya khususnya peran UPK perlu mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam program ini. Kinerja UPK Kecamatan juga mengatur pengelolaan dana program dan pengelolaan dana bergulir, kedua fungsi ini mempunyai peran penting untuk keberhasilan Program PNPM-MPd di masyarakat, karena dalam suatu organisasi, faktor dana dan pengelolaannya sangat penting untuk keberlangsungan organisasi.

Program PNPM-MPd di wilayah Situbondo adalah program dari pusat yang dilaksanakan pada setiap wilayah desa, penyelenggaraan program nasional,

di samping melaksanakan tata kelola yang baik (*good governance*) juga menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat pada PNPM-MPd yakni akuntabilitas dan transparansi. Asumsi menggunakan kedua prinsip tersebut karena merupakan prinsip-prinsip utama dari *good governance* (Krina, 2003) dan diantaranya prinsip pada PNPM Mandiri (PTO, 2008 dan www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=21). Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, pelaku PNPM-MPd (UPK Kecamatan) diharapkan akan mampu membangun penataan kelembagaan serta tata kelola yang baik (*good governance*) dan sehat. (Modul pelatihan implementasi Undang-undang No 14 tahun 2008:2). Sebenarnya pada keduanya juga terdapat prinsip partisipasi/pelibatan masyarakat, namun unsur operasionalnya sudah dijabarkan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut pada PNPM-MPd sebagai program pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang proses program-program beserta hasil-hasil yang telah dilaksanakan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten oleh organisasi publik seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM-MPd di wilayah Kabupaten Situbondo guna melakukan kontrol sosial di masyarakat, untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, menghindari salah komunikasi ataupun salah persepsi, mendorong proses masyarakat belajar dan “melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Upaya yang dilakukan oleh UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas yakni dengan cara memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan, pada tingkat program, daerah maupun di masyarakat. Seperti halnya audit yang telah dilakukan oleh pihak internal dan eksternal program, termasuk dari inspektorat Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo, BPKP, satker provinsi, RMU, hingga NMC (*National Management*

Consultant), tim dari World Bank International dan *World Bank Indonesia* pada beberapa UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Informasi tentang pengauditan ini dapat diakses <http://pemberdaya-masyarakat.blogspot.com/2012/06/dampak-audit-di-kecamatan-banyuputih.html>). Apabila kekurangan dirasakan oleh masyarakat tentang kinerja UPK Kecamatan, maka dianjurkan untuk mengungkapkan pada web: pnpm-perdesaan.or.id, pengaduan@ppk.or.id atau pengaduan@nmc.ppk.or.id. Hal ini dilakukan sebagai media pada penerapan prinsip akuntabilitas.

Pada pelaksanaan prinsip transparansi, UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Situbondo berkewajiban memberikan akses secara terbuka dan seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan administrasi, kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. Informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya melalui berbagai saluran media cetak dan elektronik, melalui media internet (pada pnpm-jatim.blogspot.com, pnpm.situbondo.blogspot.com, upkbanyuputih.blogspot.com, upk-besuki.blogspot.com, dll.). Contoh tentang keberhasilan program PNPM Mandiri Perdesaan Menunjang Keberhasilan Pendidikan & Perekonomian Masyarakat Desa Curah Jeru yang dapat diakses di <http://pnpm-jatim.blogspot.com/2013/05/pnpm-mandiri-perdesaan-menunjang.html>. Melalui media cetak seperti halnya dengan diterbitkannya Tabloid Suara Mandiri Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Situbondo Edisi III, Minggu Keempat Juni 2012, yang berisi tentang pelaksanaan program UPK dan pelaku PNPM-MPd lainnya, misalnya tentang 150 Pelajar SD dan MI Dapat Beasiswa Di Kecamatan Kendit, Impikan Paguyuban SPP; UPK Mlandingan Gencar Lakukan Pelatihan Kelompok; Ternak Ayam Arab, Sebulan Bisa Hasilkan Rp 1,5 Juta di Kecamatan Jatibanteng dan Daftar penerima dana PNPM MPd tahun 2012 di Kecamatan Kapongan dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat manual ditempelkan

di papan-papan pengumuman di tempat-tempat strategis di seluruh kelurahan/desa berupa laporan kegiatan termasuk masalah pengeluaran dan pengelolaan keuangan organisasi.

Selain pertimbangan tentang keberhasilan UPK Kecamatan di atas, penulis memilih penelitian pada PNPM Mandiri Perdesaan dan bukan pada skala perkotaan karena lingkup perdesaan lebih luas, di samping itu pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masyarakat desa karena banyak masyarakat yang miskin dan pengangguran didapatkan di lingkungan pedesaan. Selain itu penulis mempunyai pertimbangan lain adalah sebagai berikut.

1. PNPM-MPd merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air.
2. Program pemberdayaan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
3. Program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat paling miskin di wilayah perdesaan
4. Program yang menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat secara langsung.
5. Melibatkan seluruh anggota masyarakat secara partisipatif mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Data pendukung lainnya adalah, perkembangan pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh UPK saat ini jumlah asset berkisar Rp 27.150.998.000,- ada peningkatan sebesar 31% dari modal awal yang dimiliki UPK sebesar Rp 20.668.206.000,-. Pengelolaan pinjaman sesuai laporan per-Desember 2011 terdapat penurunan jumlah tunggakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari RP 3.692.662.000,- menjadi Rp 3.619.958.00,- tingkat angsuran juga mengalami peningkatan dari 88,6% pada bulan lalu dan bulan ini sebesar 89,2%. Sedangkan untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tingkat pengembalian pada bulan

lalu 86,4% dan bulan ini sebesar 86,4%. (Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo 2012:28).

Pada tahun berikutnya kegiatan dana bergulir terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Per-bulan Desember 2013 total asset (Dana Bergulir) UPK Kabupaten Situbondo telah mencapai Rp 36.667.751.974,-. Jumlah asset tersebut berasal dari penyerapan modal awal dana program sebesar Rp. 24.627.906.900. Artinya dari jumlah asset dibandingkan dengan modal awal, telah terjadi kenaikan atau perkembangan dana sebesar Rp. 12.039.845.074,- (48,8%). Dengan kenyataan tersebut menunjukkan pula bahwa jumlah pemanfaat pada PNPM-MPd juga bertambah, data menunjukkan bahwa jumlah kelompok yang dilayani pada akhir Desember 2013 yang banyak mengalami perkembangan/ pertumbuhan adalah berasal dari kelompok SPP dari 1944 kelompok menjadi 2071 kelompok, sedangkan kelompok UEP dari 319 kelompok menjadi 436 kelompok. (Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, 2013:4-6).

Selain data di atas jumlah lokasi pelaksanaan PNPM dari tahun tahun 2001 – 2011 semakin bertambah, termasuk juga pemanfaat program semakin bertambah sejak tahun 2007 – 2011 (seperti yang dijelaskan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2) begitu juga tahun 2013, serta semakin aktifnya kegiatan dana bergulir terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mana mengalami perkembangan dana sebesar 48%, ini mengindikasikan bahwa kinerja UPK Kecamatan pada Program PNPM-MPd relatif berhasil sesuai dengan tujuan program.

Data tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan kinerja pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM-MPd. di antaranya karena pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga menguatkan peran pemberdayaan masyarakat dan individu, serta penataan kelembagaan pada organisasi. Faktor keberhasilan tersebut di atas, tidak terlepas dari kegiatan pendukung lainnya seperti adanya pelatihan-pelatihan, di antaranya peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan

ketrampilan masyarakat, peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menengarai bahwa keberhasilan kinerja UPK Kecamatan PNPM-MPd di Situbondo disebabkan karena organisasi tersebut telah melaksanakan prinsip-prinsip utama dari *good governance* dan prinsip PNPM Mandiri di antaranya yaitu akuntabilitas dan transparansi, hal mana prinsip tersebut mengarah pada penguatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Dengan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul: “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia akan lebih nyata apabila terdapat sinergitas pada peran pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, organisasi sektor publik dan masyarakat. Pembangunan dapat berjalan maksimal apabila masyarakat secara umum sering dilibatkan untuk partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk juga dalam menentukan pembangunan daerahnya sendiri. Dalam UU 32 Tahun 2004 dijelaskan masyarakat berkewajiban menata daerahnya sehingga akan setara dengan daerah lainnya yang sudah maju pada tingkat perekonomian dan bidang lainnya, termasuk peningkatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya peningkatan pemberdayaan masyarakat harus melalui penataan kelembagaan dan penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*).

Salah satu program pemberdayaan masyarakat adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang titik tujuannya pada pemberdayaan masyarakat perdesaan di setiap kecamatan, dan akan terlaksana apabila UPK Kecamatan dapat mengelola dengan baik kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan serta mampu menunjukkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis operasional. Apabila dalam UPK Kecamatan tersebut mempunyai kinerja yang

rendah utamanya dalam pengelolaan organisasinya, maka hal ini akan melibatkan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pendayagunaan kualitas sumber daya manusia. Kinerja UPK Kecamatan sangat tergantung pada keseluruhan perangkat organisasi baik sumber daya manusia maupun sistem kelembagaannya. Di samping itu, keberhasilan dan kegagalan kinerja UPK Kecamatan dalam pelaksanaan PNPM-MPd juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada masyarakat demi terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* dan prinsip-prinsip pelaksanaan PNPM Mandiri antara lain akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo?
2. Adakah pengaruh transparansi terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengeksplanasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengeksplanasi pengaruh transparansi terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo.

3. Untuk mengeksplanasi pengaruh secara bersama-sama dari variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut.

1. Pada aspek Praktis.
 - a. Penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintah daerah/kabupaten dan pelaksana PNPM-MPd yakni Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dalam rangka memberikan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan.
 - b. Memberikan masukan atau saran pentingnya prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan setiap program yang melibatkan pemerintah, masyarakat serta *stake holder* beserta hasil-hasil pelaksanaan program yang dimaksud. Program yang dimaksud disini adalah Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
 - c. Untuk memberikan masukan yang berarti bagi organisasi sektor publik khususnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan sebagai pengelola dan pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), sehingga akan lebih dapat meningkatkan kinerjanya dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2. Sedangkan untuk para akademisi dan peneliti lainnya, diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada khususnya dan bidang ilmu administrasi publik pada umumnya, diharapkan dapat menjadi bahan

media untuk menerapkan, mengaktualisasikan serta mengembangkan teori yang berkaitan dengan sasaran yang diteliti. Perlu diketahui bahwa masalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu program nasional pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Program berkelanjutan (*sustainable programme*) ini dilaksanakan secara bertahap serta terlaksana dari tahun 2001 sampai tahun 2015. Dengan demikian penelitian ini akan turut berguna bagi pengembangan ilmu, utamanya ilmu administrasi publik, karena gejala-gejala yang sejenis dengan yang diteliti dalam penelitian ini seringkali ditemukan di lapang pada penelitian lain yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Model-model penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya sudah dianggap kurang sesuai lagi terhadap perubahan tatanan masyarakat dan pemerintahan pada saat ini. Karenanya, tuntutan *good governance* merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh semua kalangan dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah agar terealisasi peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan penyelenggaraan *good governance* diharapkan pemerintah menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga masyarakatnya (Dwiyanto, 2005).

Mardiasmo (2009:17) mengemukakan bahwa adanya tuntutan reformasi sektor publik diharapkan agar dapat terbentuk organisasi sektor publik yang ekonomis, transparan, efektif, responsive serta memiliki akuntabilitas yang tinggi, sehingga adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik *good governance*. Hal ini juga merupakan upaya untuk menyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik serta bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisien, pencegahan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), baik secara politik maupun administratif.

Menurut UNDP (dalam LAN dan BPKP, 2000:7) mengemukakan prinsip-prinsip/karakteristik *good governance* di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas, dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* tentu akan berpengaruh pada kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Mulyawan, 2009).

2.1 Pengertian Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Organisasi

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut dengan *accountable*. Banyak yang mengidentikan istilah *accountability* dan *responsibility*, secara umum *responsibility* (responsibilitas) adalah tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu tugas kewajibannya. Kohler (dalam Waluyo, 2007:191) mengemukakan bahwa responsibilitas adalah *acceptance of assigned authority* atau penerimaan atas penyerahan tugas atau tanggungjawab, kongkritnya penerimaan tugas atau tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahan dari pimpinan dengan segala pertanggungjawabannya.

Sedangkan dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak tersebut.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari konsep *good governance*, yaitu sebuah konsep tata kelola yang baik, diadopsi oleh berbagai negara berkembang di dunia. Rasul (2002:8) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/ sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sedangkan Annisaningrum (2010:1) mengemukakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kedua penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi.

LAN RI dan BPKP (2001:43) dan Stanbury (dalam Ismiarti, 2013:30) mengartikan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* adalah kewajiban untuk mempertanggungjawaban atas hasil keputusan yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi, baik terhadap administrasi, keuangan serta program yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi yang berdasarkan pada kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas kinerja finansial dari pemerintah maupun organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Fungsi akuntabilitas lebih menekankan pada pelaksanaan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga yang diberi mandat untuk melaksanakan program-program tertentu. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu ciri-ciri pemerintahan yang baik ([good government](#)), di mana semua pihak (baik pemerintah, swasta dan masyarakat) harus mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya. Secara umum, organisasi atau institusi harus akuntabel kepada mereka yang terpengaruh dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para pimpinan organisasi diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Penerapan akuntabilitas ini di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas prinsip-prinsip akuntabilitas yang ditetapkan.

Dikemukakan oleh Krina (2003:9) dan Mardiasmo (2009:18) bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip dari Modul

Sosialisasi Sistem Akip (LAN dan BPKP, 2000:43) adalah sebagai berikut.

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip di atas menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah segala kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan baik berupa keberhasilan maupun kegagalan program kegiatan secara terbuka, konsisten, komitmen, jujur, obyektif dan inovatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain prinsip-prinsip akuntabilitas, dalam pelaksanaannya juga dikenal bentuk-bentuk akuntabilitas, seperti yang dijelaskan oleh YPAPI (2004:70), bahwa bentuk dari akuntabilitas, yaitu.

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.
3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Selanjutnya Mardiasmo (2009:21) dan Turner and Hulme (1997) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal*

accountability).

Pelaksanaan pertanggungjawaban baik secara vertikal maupu horizontal juga harus memperhatikan bentuk-bentuk akuntabilitasnya, Krina (2003:11) menjelaskan beberapa bentuk akuntabilitas di antaranya adalah.

- 1) Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
- 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- 4) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- 5) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- 6) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 7) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Bentuk akuntabilitas di atas menjelaskan bahwa segala hasil kegiatan harus dipertanggungjawaban dengan cara melaporkan, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada semua pihak, termasuk menanggapi hal-hal yang layak untuk ditinjaulanjuti apabila ada pihak yang kurang puas terhadap kinerja organisasi yang telah diberi mandat untuk melaksanakan programnya. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi, menurut Mardiasmo (2006:5) dan Mahmudi (2011:19-20) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993), yaitu:

- “1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;
2. Akuntabilitas Manajerial;
3. Akuntabilitas Program;
4. Akuntabilitas Kebijakan;
5. Akuntabilitas Finansial”.

Dimensi-dimensi akuntabilitas publik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas dari lembaga-

lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi/kewenangan. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas ini dapat juga disebut akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga/organisasi publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial lebih menitikberatkan pada ukuran anggaran dan finansial. Pengelolaan keuangan publik sangat penting karena menjadi perhatian utama di masyarakat.

Dapat dijelaskan bahwa dimensi-dimensi dari akuntabilitas terdapat beberapa faktor penting yaitu kejujuran, adanya ketaatan hukum dan peraturan, adanya pertanggungjawaban pada proses organisasi serta efektifitas dan efisiensi serta pertanggungjawaban setiap kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan dan administrasi.

Prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik harus digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif pada pelayanan publik dan penyampaian secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini harus juga dilakukan oleh pelaku yang diberi mandat dalam melaksanakan setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pelaksana program pemerintah, yakni pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM-MPd di Situbondo.

2.1.2 Transparansi

Pemerintahan yang bersih (*Good Government*) adalah salah satu tujuan atau ekspektasi dari *Good Governance*, selain pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip keterbukaan atau yang dinamakan transparansi. Mardiasmo (2004:102) menjelaskan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan melalui UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di dalamnya menjelaskan azas keterbukaan (transparansi) pada

penyelenggaraan pemerintah daerah, azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam UU No.14 Tahun 2008 tersebut telah di atur:

“Bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan organisasi publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik seperti halnya informasi tentang permasalahan ekonomi, sosial, politik maupun bidang-bidang lainnya haruslah tersedia dan dapat diakses oleh semua orang dengan sarana media massa, media elektronik maupun media cetak yang bertanggung jawab.

Menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Krina (2003:14) mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Dari beberapa pengertian di atas, transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas atau suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui program yang bersentuhan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi yang diberi mandat untuk melaksanakan program, termasuk di dalamnya prosedur, keputusan-keputusan yang diambilnya dalam pelaksanaan urusan publik. Selain itu, pemerintah dan

organisasi publik harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang program yang diselenggarakan pemerintah dari awal hingga akhir penyelesaiannya. Sebagai warganegara, prinsip transparansi adalah kebebasan seseorang untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik/umum dari pemerintah maupun organisasi sektor publik.

Prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi. Menurut Mardiasmo (2002:19) karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah:

1. *Informativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat;

2. *Openess* (keterbukaan).

Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang;

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Ciri-ciri yang mendasar pada prinsip transparansi adalah adanya unsur-unsur informatif kepada semua pihak, keterbukaan pada setiap orang/lembaga untuk mengakses data yang berkaitan dengan kepentingan publik, serta unsur yang dapat diberikan atau diungkapkan secara sukarela oleh sumber informasi (Pemerintah, Organisasi publik maupun sektor swasta) dengan segala pertanggungjawabannya pada masyarakat. Artinya, bahwa transparansi harus dilakukan oleh unsur masyarakat dan individu dari pihak penerima informasi serta pihak lain sebagai pemberi informasi harus secara sukarela memberikan informasi

kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

2.1.3 Pengertian Kinerja Organisasi

Istilah kinerja (*performance*) sering didengar pada konsep sumberdaya manusia dan manajemen publik. Pada dasarnya ada dua konsep kinerja, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329).

Amins (2012:47) mengartikan kinerja sebagai ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas sehingga menghasilkan suatu produk yang merupakan wujud dari semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Prawirosentono (2008: 2) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Gibson (dalam Dewi, 2006:12) merupakan kesatuan yang memungkinkan orang untuk bekerja sama mencapai tujuan. Robbins (1994:5) menyatakan organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus berpartisipasi secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Suatu organisasi dibentuk secara bersama karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mooney (1996:23):

Organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama akan tetapi perlu kita fahami bahwa yang menjadi dasar organisasi, bukan “siapa” akan tetapi “apanya” yang berarti bahwa yang dipentingkan bukan siapa orang yang akan memegang organisasi, tetapi “apakah” tugas dari organisasi.

Penjelasan di atas mengartikan bahwa organisasi adalah sekumpulan manusia yang bekerjasama dalam suatu wadah berdasarkan oleh aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya.

Demikian halnya seperti organisasi sektor publik, pada umumnya berupa lembaga-lembaga Negara/pemerintahan atau organisasi yang mempunyai keterkaitan dengan keuangan negara, kegiatan organisasi berorientasi pada kepentingan publik, yaitu suatu entitas yang memiliki aktivitas berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Oleh karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Mahmudi (2011:2) menjelaskan bahwa organisasi sektor publik adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi Sektor Publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks, komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi sektor ekonomi, politik, kultur, dan demografi. (Mardiasmo, 2009:27).

Organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik apabila memenuhi karakteristik berikut:

1. Organisasi bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik;
2. Organisasi berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan Negara;
3. Organisasi bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik publik atau milik Negara. (Mahmudi, 2011:3).

Masalah-masalah yang ditangani semua organisasi termasuk oleh sektor publik di antaranya masalah kemiskinan, pengangguran, perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2011:8). Dapat dikatakan bahwa organisasi sektor publik adalah sekumpulan orang-orang yang ada dalam wadah tertentu, saling bekerjasama dalam pelayanan publik untuk mengatasi beberapa persoalan di antaranya adalah masalah kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Salah satu organisasi sektor publik yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Dalam organisasi ini kegiatan-kegiatannya dilakukan/digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaksana program, dengan kata lain tercapainya visi, misi serta tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan yakni yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Organisasi (PTO) PNPM.

Terkait kinerja dan organisasi, Rummler dan Brache (dalam Sudarmanto, 2009:7) mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu sebagai berikut.

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Sedangkan pengertian kinerja organisasi menurut Wibawa (1992:64); Atmosudirdjo (1997:11) dan Nasucha (dalam Pasolong, 2011:176-177) adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif. Dalam mengelola kegiatan setiap organisasi memiliki target dan tujuan masing-masing untuk menilai capaian kegiatan yang

dihasilkan atau yang disebut dengan analisis kinerja. Begitu pula pada organisasi sektor publik juga memerlukan analisis terhadap kinerjanya untuk akuntabilitas publik (Mahmudi, 2005:7)

Selanjutnya Soedjono (2005:25) menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer/pimpinan, jadi kinerja merupakan hasil yang diinginkan organisasi dari perilaku orang-orang di dalamnya.

Dari berbagai pengertian kinerja organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi ialah hasil kerja secara menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi melalui usaha-usaha yang sistemik didukung kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja organisasi terdiri dari:

1. totalitas hasil kerja yang dicapai secara individual maupun secara kelembagaan;
2. pada pelaksanaan tugas, setiap orang atau lembaga diberi wewenang dan tanggungjawab berdasarkan oleh tupoksinya masing-masing, sehingga orang atau lembaga diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai waktu dan tujuan yang telah ditentukan;
3. aktivitas personal dan organisasi yang berkaitan dengan tugas harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
4. tugas personal yang berkaitan dengan organisasi tidak boleh bertentangan dengan moral atau etika yang berlaku umum.

Dapat dikatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.1.3.1 Penilaian Kinerja

Tolok ukur penilaian kinerja pada setiap kasus analisis kinerja organisasi selalu memperlihatkan perbedaan, sebab aktivitas setiap organisasi memiliki ciri spesifiknya yang berbeda pula. Simamora (2004:338) menyatakan bahwa

penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu pegawai. Sehingga penilaian kinerja memberikan mekanisme penting untuk menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja organisasi diwaktu berikutnya.

Keban (2004:200) menjelaskan bahwa penilaian kinerja yang efektif adalah penilaian yang telah menggunakan prinsip-prinsip penilaian dan secara tepat menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian kinerja juga berkaitan dengan kinerja organisasi, seperti dijelaskan oleh Gaspersz (2003:68) bahwa pengukuran fakta-fakta akan menghasilkan data, apabila dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat, sehingga akan berguna bagi peningkatan pengetahuan para pimpinan/manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan Ruky (dalam Tangkilisan, 2005:176) menyatakan bahwa penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan yang direncanakan.

Berbagai pengertian penilaian kinerja telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dapat dikemukakan bahwa penilaian kinerja secara komprehensif mencakup penilaian secara formal dan sistematis dengan dimensi hasil, perilaku, pelaku, dan sifat personalitas yang didasarkan pada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta visi, misi, dan tujuan organisasi yang bertujuan memperbaiki kinerja individu, kinerja organisasi dan kinerja proses. Penilaian kinerja juga membandingkan data dari yang direncanakan dengan hasil yang dicapai, apabila komparasi ini didapatkan bahwa hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan, maka tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja selalu menekankan pada tujuan tertentu dan manfaat yang dirasakan untuk keberlanjutan organisasi serta dorongan bagi karyawan untuk lebih meningkatkan kapabilitasnya. Mulyadi (1993:420) menjelaskan bahwa manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut.

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi pelatihan karyawan.
3. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
4. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Selanjutnya Mulyadi (dalam Prayitno, 2010:9-10) mengemukakan bahwa tujuan pokok penilaian kinerja menurut adalah untuk memotivasi karyawan/petugas dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam peraturan organisasi. Selanjutnya Mahmudi (2010:14) menyebutkan bahwa tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah:

1. mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;
2. menyediakan sarana pembelajaran pegawai;
3. memperbaiki kinerja periode berikutnya;
4. memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward and punishment*;
5. memotivasi pegawai;
6. menciptakan akuntabilitas publik .

Sedangkan menurut Werther dan Davis (1996:342), tujuan dan manfaat penilaian kerja bagi organisasi dan pegawai adalah sebagai berikut.

1. *Performance Improvement.*
Yaitu pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.
2. *Compensation adjustment.*
Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.
3. *Placement Decision.*
Menentukan promosi, transfer, dan demotion.
4. *Training and development needs.*
Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.
5. *Carrer Planning And Development.*
Memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai.

6. *Staffing Process Deficiencies.*
Mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai.
7. *Informational Inaccuracies and Job-Design Errors.*
Membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terutama dibidang informasi *job-analysis*, *job-design* dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
8. *Equal Employment Opportunity.*
Menunjukkan bahwa *placement decision* tidak diskriminatif;
9. *External Challenges.*
Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya.
10. *Feedback.*
Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa penilaian kinerja bertujuan untuk menilai produktivitas seseorang apakah telah sesuai dengan standar organisasi melalui pemberian motivasi-motivasi yang diperlukan untuk memicu produktivitas dari organisasi. Sedangkan manfaat dari penilaian kinerja itu adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang diperlukan dan ditambahkan guna memotivasi seseorang sehingga dapat menghasilkan organisasi yang efektif.

2.2 Akuntabilitas dan Transparansi pada PNPM Mandiri Perdesaan

Beberapa prestasi yang dihasilkan organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* seperti transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian di semua kalangan, termasuk bagian eksekutif, konsultan korporasi, akademisi, dan pembuat kebijakan (pemerintah) di berbagai negara termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi sektor publik lainnya. UPK Kecamatan juga melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi, selain karena didasarkan pada prinsip *good governance*, juga merupakan prinsip-prinsip dasar dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan (yang diberi amanah pelaksana program), pada tingkat

program daerah maupun di masyarakat. Sehingga semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran harus melaksanakan hasil dan proses pengambilan keputusan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan di atas, selain menerapkan prinsip akuntabilitas, PNPM-MPd juga melaksanakan prinsip transparansi, yakni dengan memberikan akses secara terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan untuk mengetahui informasi-informasi, kebijakan serta pengambilan keputusan, perkembangan administrasi, kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi lainnya dari pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat. Informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan harus dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya melalui berbagai saluran media cetak dan elektronik, melalui media internet, secara manual ditempelkan di papan-papan pengumuman di tempat-tempat strategis di seluruh kelurahan/desa.

Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan serta keuangan juga wajib berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang harus ditaati secara konsisten oleh semua pelaku PNPM Mandiri khususnya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan sebagai pelaksana dari PNPM Mandiri Pedesaan. Masyarakat juga memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Semua unit pengambilan keputusan dalam semua tataran program harus melaksanakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang telah ditetapkan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) pada PNPM-MPd. Pada tataran masyarakat, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti konsultasi publik, rapat koordinasi berkala, pertemuan lembaga atau kelompok masyarakat penerima bantuan, rapat tahunan atau forum pertanggungjawaban, musyawarah para pihak terkait PNPM Mandiri dan komunitas belajar masyarakat. (*jdih.bpk.go.id/wp-content/.../Tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf, hal: 21*)

2.3 Pengaruh Antarvariabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh variabel akuntabilitas dan kinerja organisasi

Akuntabilitas adalah salahsatu prinsip yang penting juga untuk mencapai *good governance*, dimana tidak hanya berlaku pada pemerintah, namun juga pada pengelolaan organisasi sektor publik seperti UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang mendasar untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang telah didelegasikan khususnya untuk pencapaian tujuan dengan tingkat efisiensi, efektifitas dan kejujuran (Widodo, 2011)

Pengaruh antara variabel akuntabilitas dan kinerja organisasi seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:21) bahwa akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Mahmudi (2007:9) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam penjelasannya, LAN dan BPKP (modul 1, 2000:35), akuntabilitas yang efektif jika memiliki ciri-ciri di antaranya merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja individu maupun untuk organisasi. Sedangkan UNDP menjelaskan akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Muhammad (2007) dalam Sutedjo (2009:32) mengemukakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja. Hasil penelitian Ratias (2010) menjelaskan adanya pengaruh yang kuat variabel akuntabilitas terhadap kinerja Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya hasil penelitian Manurung (2012) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD dengan besaran koefisien *path* sebesar 0.304 dan nilai t-statistik $2,455 > 2,03$.

2.3.2 Pengaruh variabel transparansi terhadap kinerja organisasi

Transparansi merupakan salahsatu prinsip dalam menerapkan konsep *good governance*. Kemudahan akses Informasi serta mudah dipahami akan memberikan peluang kepada publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Transparansi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pertanggungjawaban terhadap publik, sehingga melalui prinsip ini, maka penyelenggara organisasi sektor publik diberikan keluasaan untuk mengetahui segala yang terjadi pada penyelenggaran organisasi khususnya dalam mengelola program kerja, rencana kerja, administrasi maupun keuangannya. Dengan prinsip transparansi ini pula, masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan, program yang telah ditetapkan oleh organisasi, sehingga akan terjadi umpan balik serta memudahkan pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada organisasi sektor publik (seperti UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan).

Pengaruh variabel transparansi dan kinerja organisasi dapat dijelaskan oleh Werimon, dkk (2007:21-23), yang menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya dalam Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002:18) bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Kontrol yang besar dari masyarakat ini akan menyebabkan pengelola pemerintahan atau organisasi publik lainnya akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

Hasil penelitian Fetri (2013) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat variabel transparansi terhadap kinerja perusahaan dengan signifikansi $0,013 < 0,05$. Penelitian ini diuji menggunakan uji regresi berganda

yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya Hapsari (2011:38) menyatakan bahwa terdapat pengaruh transparansi dan kinerja, dengan meningkatkan pegungkapan sukarela dan pelaporan yang lebih tepat waktu menghasilkan transparansi yang lebih tinggi. Hasil Penelitian Sipeni (2013) menyatakan terdapat pengaruh variabel transparansi terhadap Kinerja Koperasi Karyawan Usaha Bakti Universitas Merdeka Madiun dimana nilai sig_{hitung} untuk variabel transparansi sebesar 0,002 lebih kecil daripada 5%

2.3.3 Pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja organisasi

Sedangkan pengaruh variabel transparansi, akuntabilitas terhadap kinerja organisasi dijelaskan oleh Rahmanurrasjid (2008:146-147) bahwa penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat. Werimon, dkk. (2007) menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat oleh karenanya pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

Temuan Auditya, dkk. (2013) menyatakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Propinsi Bengkulu. Selain itu, Garini (2011:131) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas di Kota Bandung.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian sebelumnya telah

mengkaji masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi dan kinerja, dan beberapa penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini seperti yang terdapat pada table di bawah ini.

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

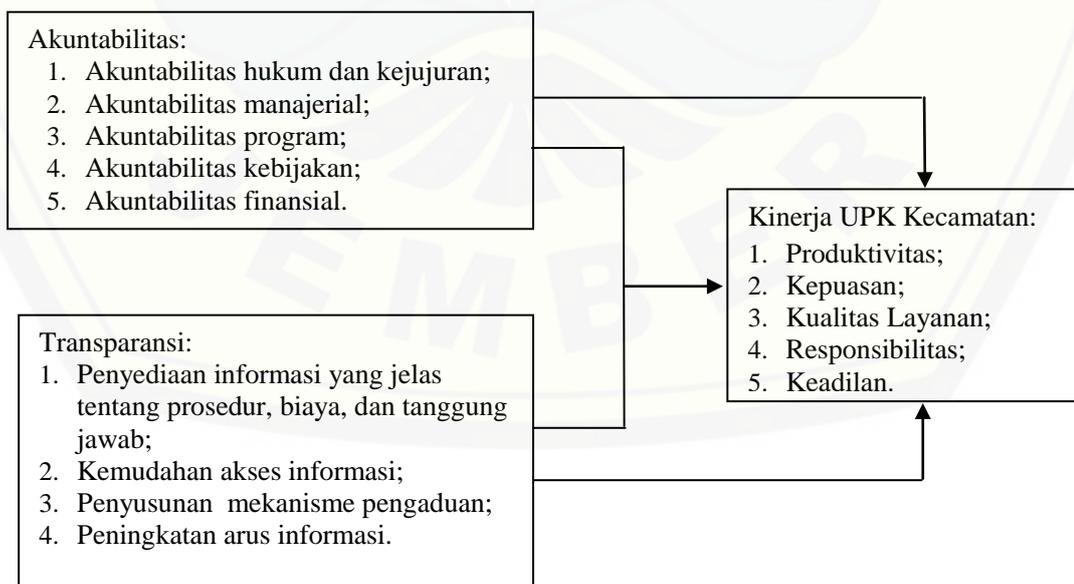
No	Penulis	Judul	Simpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Putra, (2013)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (<i>Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang</i>)	Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD	Variabel bebas akuntabilitas (X1) Variabel terikat adalah kinerja organisasi Unit analisis organisasi	Tidak terdapat variabel bebas transparansi (X2) dan Kejelasan Sasaran Anggaran Obyek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang
2.	Arifin, dkk., (2012)	Hubungan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	Terdapat hubungan antara variabel partisipasi dan transparansi dengan variabel kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	Variabel transparansi	Tidak terdapat variabel akuntabilitas dan partisipasi Menjelaskan tentang hubungan Unit analisis individu Obyek penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo
3.	Setiaji, dkk., (2010)	Pengaruh Sentralisasi, Pengendalian dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Efektivitas Kinerja Pengurus Unit	Sentralisasi, Pengendalian dan Sistem Akuntansi Manajemen Secara Bersama-Sama Mempunyai Pengaruh yang Signifikan	Variabel terikat (Y) Kinerja (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Unit analisis organisasi	Semua variabel bebas (X1, X2 dan X3) Lokasi Pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten

		Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Boyolali.	terhadap Efektivitas Kinerja Pengurus Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Boyolali		Boyolali
4.	Aji, dll., (2011)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo.	Akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo.	Menjelaskan Variabel bebas akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan kinerja (Y) Variabel terikat adalah kinerja organisasi Unit analisis organisasi	Tidak membahas variabel partisipasi penyusunan anggaran Tidak membahas pada transparansi kebijakan publik Obyek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo
5.	Ningsih dkk. (2011)	Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> (akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi) dengan Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur	Beberapa prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> (akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi) berhubungan dengan Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur..	Menjelaskan variabel akuntabilitas, transparansi dan kinerja	Tidak menjelaskan tentang keadilan dan partisipasi Menjelaskan tentang hubungan Unit analisis individu Obyek penelitian pada Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

2.5 Kerangka Konseptual

Good governance adalah suatu model penyelenggaraan negara yang mengarah pada manajemen/penataan yang lebih baik melalui perumusan kebijakan serta berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem nilai dalam operasional di berbagai organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip utama *good governance*, di antaranya transparansi dan akuntabilitas lebih menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban setiap penyelenggaraan organisasi yang diikuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu- individu atau penguasa dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program/kegiatan. Sedangkan Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan suatu organisasi. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai pelaksanaan dari visi, misi, dan strategi instansi/ organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Memperhatikan penjelasan di atas, peneliti menentukan bagan kerangka konseptual sebagai berikut.

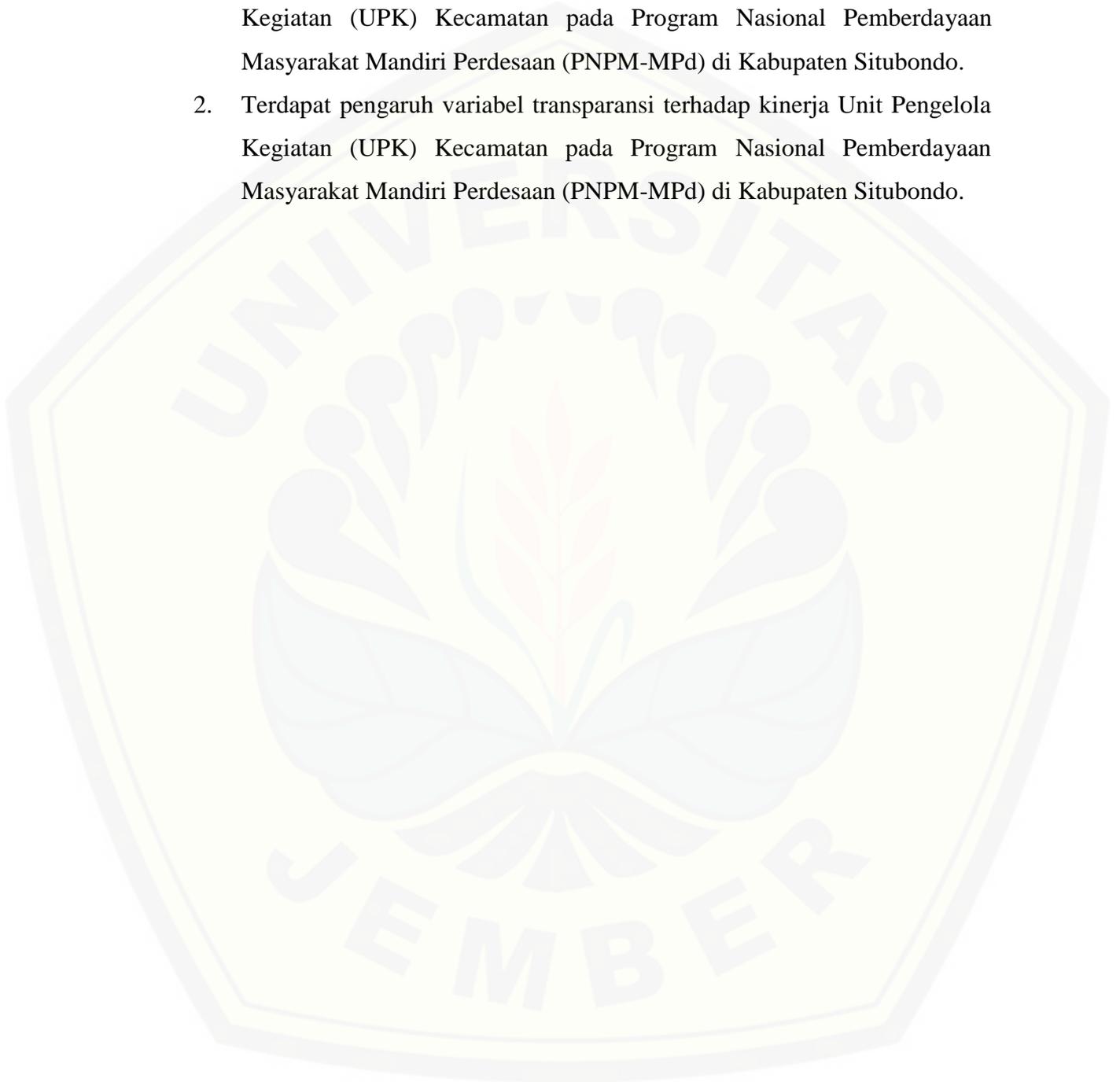


Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Penelitian

2.6. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh variabel akuntabilitas terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo.
2. Terdapat pengaruh variabel transparansi terhadap kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Situbondo.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara berfikir, upaya dan tindakan yang dipersiapkan melalui suatu prosedur/ tata cara dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah atau untuk pengujian hipotesis suatu penelitian. Salah satu unsur terpenting dalam metodologi penelitian adalah penggunaan metode ilmiah tertentu yang digunakan sebagai sarana yang bertujuan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala dan mencari pemecahan masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Sugiyono (2013:2) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data maupun informasi dengan kegunaan dan tujuan tertentu, dilakukan secara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara masuk akal, empiris adalah cara-cara yang dilakukan sehingga terjangkau oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah berkesinambungan yang bersifat logis.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah metode penelitian kuantitatif, dimana pada proses penganalisaan data dilakukan setelah semua data terkumpul dan terkuantifikasi dalam bentuk angka yang dapat merepresentasikan realitas sosial untuk menguji hipotesis beserta variabelnya. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang menggunakan pendekatan pengukuran atau numerik terhadap masalah yang hendak diteliti dan juga pada pengumpulan data dan analisa data. (Pasolong, 2011:165). Selanjutnya Sugiyono (2013:7) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan Morissan (2012:23) mengemukakan bahwa riset kuantitatif menuntut variabel yang diteliti

dapat diukur. Bentuk riset semacam ini memberikan perhatian besar pada beberapa sering variabel yang muncul, dan umumnya menggunakan angka untuk menyampaikan suatu jumlah.

Dapat dikatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah terencana, sistematis dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya, banyak menggunakan angka, yakni dari data terkumpul, penafsiran pada data, serta penampilan dari hasilnya. Ciri khas lainnya, pada penelitian ini akan sering dijumpai tabel, gambar, grafik, atau tampilan lainnya.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanasi/ *Explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Bungin (2006) dan Umar (2004:26) menjelaskan bahwa pendekatan eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel populasi atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Pasolong (2012:75) mengemukakan bahwa penelitian *explanatory* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing research*.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini adalah asosiatif yaitu menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Terdapat tiga macam hubungan, yaitu: hubungan simetris, hubungan kausal dan hubungan interaktif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *hubungan kausal*, yakni terdapat variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Penulis dalam penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh yang terjadi antara variabel akuntabilitas (X_1) dan variabel transparansi (X_2) terhadap kinerja UPK PNPM-MPd (Y) di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan pada pendekatan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *survey*, sebagaimana yang dinyatakan Kerlinger (1996) yang dikutip Riduwan (2011:49) dan Pasolong (2012:72-73) mengemukakan bahwa penelitian *survey* adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antarvariabel sosiologis maupun psikologis.

3.2 Satuan Analisis dan Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2010:187) yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek penelitian. Morrisan (2012:49) menjelaskan bahwa unit analisis yang sering digunakan pada penelitian ilmu sosial terdiri atas, individu, kelompok, organisasi, interaksi sosial dan artefak sosial. Jadi satuan analisis yang dimaksud adalah satuan tertentu yang digunakan sebagai obyek penelitian berupa individu, organisasi, artefak sosial dan interaksi sosial. Pada penelitian ini, maka unit analisis yang ditetapkan adalah satuan unit analisis organisasi yakni Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Nasional Masyarakat Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan di wilayah Situbondo.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan pada penelitian ini, adapun macam data yang diperlukan adalah sebagai berikut.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Data primer dan data sekunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan variabel-variabel penelitian, adapun pertanyaan tersebut bersifat tertutup (setiap pertanyaan sudah disediakan alternatif jawaban), sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan. Sebelum kuisisioner disebarkan kepada responden, di samping peneliti melakukan beberapa uji coba terlebih dahulu kepada sejumlah kecil responden, juga selalu *sharing* dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kompetensi pada penelitian ini. Manfaat dari uji coba kuisisioner adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dimaksud. Selain itu, apabila dalam proses uji coba kuisisioner ini terdapat banyak kesalahan, maka peneliti bisa mengubah atau menyempurnakan isi dari kuisisioner tersebut.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau bertanya langsung kepada responden dan pihak-pihak yang terkait. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam khususnya untuk memperoleh tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu organisasi seperti UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, keterbukaan serta hasil kerjanya selama waktu penelitian ini berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya yang relevan dengan penelitian untuk mendukung data tentang kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo.

d. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian beserta gejala yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, keterbukaan serta kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2013:80) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Riduwan (2011 : 54) mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Sukmadinata (2008:250) menyebutkan bahwa orang-orang, lembaga, organisasi, benda-benda yang menjadi sasaran penelitian merupakan anggota populasi. Anggota populasi yang terdiri atas orang-orang biasa disebut subjek penelitian, tetapi kalau bukan orang disebut objek penelitian. Penelitian tentang suatu objek mungkin diteliti langsung terhadap objeknya, tetapi mungkin juga hanya kepada orang yang mengetahui atau bertanggung jawab terhadap objek tersebut.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga bisa organisasi, objek dan benda-benda alam yang lain yang menjadi sasaran penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini populasinya adalah semua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan di seluruh wilayah Situbondo sebanyak 13 kecamatan.

3.4.2 Sampel

Pada pelaksanaan penelitian tidak perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena hal ini akan memakan waktu dan biaya tidak sedikit, untuk itu diperlukan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pasolong (2012:100) dan Arikunto (dalam Riduwan, 2011:56) menyatakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi tersebut dinamakan sampel. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil atau ditentukan sebagai sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi.

Karena penelitian ini menggunakan unit analisis organisasi yakni UPK Kecamatan, maka peneliti menggunakan sampel sebanyak 13 UPK Kecamatan pada PNPM-MPd. Adapun 13 UPK Kecamatan se-Kabupaten Situbondo terdiri dari UPK Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih. Peneliti menentukan 3 orang pengurus harian UPK Kecamatan yang terdiri dari ketua, sekerataris dan bendahara dimana jabatan tersebut mewakili organisasi UPK Kecamatan, karena mereka diberi mandat untuk mengelola kegiatan program pemberdayaan (PNPM-MPd) serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasinya secara terbuka kepada yang memberi mandat baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif, termasuk juga memberikan akses kepada masyarakat tentang segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan. Dari 13 UPK Kecamatan serta masing-masing UPK Kecamatan terdiri dari 3 orang pengurus, maka jumlah keseluruhan sampel adalah sebanyak 39 orang. Oleh karena itu, maka peneliti dalam penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2013:85) dan Pasolong (2013:106) *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila keseluruhan anggota populasi digunakan sebagai sampel. Arikunto (dalam Pasolong, 2013:107) menyatakan bahwa apabila jumlah sampel kurang dari 100, maka yang menjadi sampel adalah keseluruhan dari populasi yang ada.

3.5 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Identifikasi Variabel

Variabel menurut Sugiyono (2013:38) adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kerlinger (dalam Sugiyono, 2013:38), menyatakan bahwa variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari. Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian (Arikunto, 2010:161). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Situbondo.

Kedudukan variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Variabel bebas atau *independent variable* yang disimbolkan X pada penelitian ini adalah akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2).
- b. Variabel terikat atau *dependent variable* yang disimbolkan Y pada penelitian ini adalah kinerja (Y) UPK PNPM-MPd Kecamatan.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Setelah variabel-variabel diidentifikasi dan diklasifikasikan, maka variabel-variabel tersebut perlu dioperasionalkan. Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian melalui alat pengukuran. Penentuan dan pengukuran variabel biasanya berupa angka-angka atau atribut-atribut lainnya sehingga membentuk suatu informasi ilmiah.

Dalam penelitian ini tidak semua indikator diteliti, tetapi hanya diambil beberapa indikator saja sesuai kebutuhan penelitian. Di bawah ini akan dijelaskan indikator-indikator pada variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel Akuntabilitas (X_1)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mengacu pada dimensi akuntabilitas menurut Rasul (2003:11); Mardiasmo (2006:5) dan Mahmudi (2010:28) yang mengutip dari Hopwood dan

Tomkins, (1984) dan Elwood (1993), mengemukakan bahwa indikator akuntabilitas pada sektor publik UPK Kecamatan PNPM-MPd adalah sebagai berikut.

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
 - a. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
 - b. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat ntuk menghindari terhadap penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas Manajerial.
 - a. Pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif
 - b. Bertanggung jawab pada inefisiensi pelaksanaan organisasi
3. Akuntabilitas Program.
 - a. Pemilihan alternatif program yang memberikan hasil optimal.
 - b. Bertanggung jawab pada proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan
 - c. Pelaksanaan program mendukung pencapaian tujuan organisasi
4. Akuntabilitas Kebijakan.
 - a. Bertanggung jawab pada keputusan yang telah diambil beserta dampaknya
 - b. Adanya perhatian pada sasaran terhadap pelaksanaan keputusan.
5. Akuntabilitas Finansial.
 - a. Pengelolaan uang publik secara secara ekonomi, efisien, dan efektif.
 - b. Penghindaran pemborosan, kebocoran dan dan korupsi
 - c. Hasil Pengelolaan laporan keuangan dipublikasikan pada masyarakat.

a. Variabel Transparansi (X_2)

Transparansi identik dengan keterbukaan informasi, istilah lain adalah kebebasan seseorang atau komunitas secara langsung untuk memperoleh informasi termasuk yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan manajemen suatu organisasi. Adanya ketersediaan informasi, seseorang/ komunitas dapat berpartisipasi untuk mengawasi setiap kebijakan

publik yang muncul, sehingga mempunyai nilai lebih bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak di masyarakat secara tidak proporsional.

Tujuan transparansi adalah untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar. Transparansi dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*) bagi setiap organisasi. Mengacu penjelasan Krina (2003:15), maka indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, pembiayaan pada setiap rencana dan kegiatan PNPM-MPd di masyarakat
 - a. Penyediaan informasi tentang rencana dan kegiatan organisasi
 2. Kemudahan akses informasi.
 - a. Kemudahan dalam mengakses informasi mengenai rencana dan hasil kegiatan.
 - b. Kemudahan berinteraksi untuk menanggapi keluhan dari masyarakat.
 3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.
 - a. Penyediaan sarana tata cara pengaduan
 - b. Pengaduan hasil kegiatan organisasi secara terbuka
 4. Meningkatkan arus informasi.
 - a. Penyediaan sarana teknologi informasi.
 - b. Kecepatan merespon pengaduan
 - c. Penyebaran informasi melibatkan media dan lembaga lain
- b. Variabel Kinerja Organisasi UPK (Y)

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam kurun waktu tertentu serta terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact*. Tujuan yang dicapai diselaraskan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi, tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Pengukuran/ penilaian kinerja organisasi sektor publik tidak terlepas dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator-indikator kinerja untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum. Menurut Dwiyanto (2013:50-51) indikator dalam mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Ratminto dan Atik (2013:179-180) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi harus dipergunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses, dan ukuran yang berorientasi pada hasil. Sedangkan yang berorientasi pada hasil adalah efektivitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan dan keadilan.

Selanjutnya Widodo (2008:98) menjelaskan bahwa untuk menilai kinerja suatu organisasi tertentu, tidak dapat dilakukan tanpa mengukur kegiatan, program dan kebijakan terlebih dahulu. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melihat tingkat kegagalan dan keberhasilan instansi dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Maka untuk mengetahui bagaimana kinerja UPK Kecamatan PNPM di Kabupaten Situbondo dapat dilihat melalui kinerjanya dalam melaksanakan hasil kegiatan di masyarakat pada pelaksanaan program nasional tersebut. Dari sejumlah paparan indikator kinerja tersebut dapat dikelompokkan berdasar orientasi pada hasil seperti yang dijelaskan oleh Dwiyanto (2013) dan Ratminto dan Atik (2013), maka pada penelitian ini, penulis menggunakan indikator kinerja organisasi UPK PNPM-MPd. Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang berorientasi pada hasil, adalah sebagai berikut.

1) Produktifitas.

Pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2) Kepuasan.

Pemenuhan kebutuhan organisasi dan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan.

3) Kualitas Layanan.

Peningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik pada pelaksanaan kegiatan program.

4) Responsibilitas.

Pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi atau peraturan organisasi.

5) Keadilan.

Pelayanan kegiatan dilaksanakan secara merata dan memenuhi unsur keadilan.

Dari penjelasan di atas, perlu diformulasikan definisi operasional dan indikator dari masing-masing variabel, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas (X₁) Mardiasmo (2002:20) Mahmudi (2010:23)	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	1. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 2. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari penyalahgunaan jabatan.	Ordinal Ordinal
	2. Akuntabilitas manajerial	1. Pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif 2. Bertanggung jawab atas inefisiensi pelaksanaan organisasi	Ordinal Ordinal
	3. Akuntabilitas program	1. Pemilihan alternatif program yang memberikan hasil optimal. 2. Bertanggung jawab atas proses dan pelaksanaan program yang telah ditetapkan 3. Pelaksanaan program mendukung pencapaian tujuan organisasi.	Ordinal Ordinal Ordinal
	4. Akuntabilitas kebijakan	1. Bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil beserta dampaknya	Ordinal

		2. Adanya perhatian pada sasaran terhadap pelaksanaan keputusan.	Ordinal
	5. Akuntabilitas finansial	1. Pengelolaan uang publik secara secara ekonomi, efisien, dan efektif. 2. Penghindaran pemborosan, kebocoran dan dan korupsi 3. Hasil Pengelolaan laporan keuangan dipublikasikan pada masyarakat.	Ordinal Ordinal Ordinal
Transparansi (X₂) Krina (2003:14) Mardiasmo (2009:18)	1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab	Penyediaan informasi tentang rencana dan kegiatan organisasi.	Ordinal
	2. Kemudahan akses informasi.	1. Kemudahan dalam mengakses informasi mengenai rencana dan hasil kegiatan. 2. Kemudahan berinteraksi untuk menanggapi keluhan dari masyarakat.	Ordinal Ordinal
	3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.	1. Penyediaan sarana tata cara pengaduan 2. Pengaduan hasil kegiatan organisasi secara terbuka.	Ordinal Ordinal
	4. Meningkatkan arus informasi.	1. Penyediaan sarana teknologi informasi. 2. Kecepatan merespon pengaduan 3. Penyebaran informasi melibatkan media dan lembaga lain.	Ordinal Ordinal Ordinal
Kinerja Organisasi (Y) Ratminto dan Atik, (2013:179-180) dan Agus Dwiyanto (2006:50-51)	1. Produktivitas	Pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Ordinal
	2. Kepuasan	Pemenuhan kebutuhan organisasi dan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan.	Ordinal
	3. Kualitas Layanan	Peningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik pada pelaksanaan kegiatan program.	Ordinal
	4. Responsibilitas	Pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi atau peraturan organisasi.	Ordinal

	5. Keadilan	Pelayanan kegiatan dilaksanakan secara merata dan memenuhi unsur keadilan.	Ordinal
--	-------------	--	---------

3.6 Teknik Pengukuran Variabel

Teknik pengukuran variabel yang diperoleh dari kuisisioner akan diukur dengan menggunakan Skala Likert, skala ini banyak digunakan dalam penelitian survei, dan responden diminta untuk memilih apakah ia sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju maupun sangat tidak setuju, umumnya hal ini untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang kejadian atau gejala sosial pada tingkat ordinal. Setiap skor yang dipilih mempunyai bobot yang berbeda. Skala ini menggunakan *Summated-Rating Likert's* (SRL) atau skala *aditif* karena skor seseorang pada skala dihitung dengan menjumlahkan tanggapan yang diberikan dan bukan dicari nilai rata-ratanya, yang akhirnya menghasilkan skor tunggal untuk suatu topik. Kekuatan skala Likert ini terletak pada kesederhanaan dan kemudahan dalam penggunaannya. Ketika menggabungkan beberapa butir pertanyaan yang telah diperingkatkan, didapatkan pengukuran indikator yang majemuk lebih komprehensif. (Neuman, 2013).

Dengan menggunakan Skala Likert, maka dimensi dijabarkan menjadi variabel kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator, selanjutnya indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2013:93). Peneliti menggunakan teknik pengukuran skala Likert karena ingin mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden yang dianggapnya sesuai (memilih apakah ia sangat setuju, setuju, netral/ragu-ragu, tidak setuju maupun sangat tidak setuju) pada butir-butir jawaban dalam kuisisioner yang telah disediakan oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel akuntabilitas, transparansi dan kinerja UPK Kecamatan.

Pada penelitian ini, operasionalisasi variabel *independent* (X_1 dan X_2) maupun variabel *dependent* (Y) menggunakan skala ordinal. Riduwan (2011:84) mengemukakan skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah atau sebaliknya. Dengan menggunakan skala ordinal bertujuan untuk memberikan

informasi berupa nilai pada jawaban tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo berupa metode skoring data. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, [responden](#) menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti.

1. Kriteria sangat setuju/baik/suka (SS) = 5
2. Kriteria setuju/baik/suka (S) = 4
3. Kriteria cukup setuju/netral/ragu-ragu(CS) = 3
4. Kriteria tidak setuju/baik/kurang (TS) = 2
5. Kriteria sangat tidak setuju/kurang sekali (STS) = 1

3.7. Analisa Data

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:59) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Menurut Kerlinger (dalam Nazir, 2005) terdapat 4 jenis validitas untuk menguji validitas instrument, yaitu validitas isi, validitas kriteria, validitas konstruk dan validitas muka, selanjutnya dijelaskan dengan menggunakan analisis butir.

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Instrumen-instrumen tersebut diwujudkan melalui item-item dalam kuisisioner. Suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuisisioner tersebut.

Menurut Ghozali (2013:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Dengan menggunakan instrumen yang valid dalam

pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid/sahih. (Riduwan, 2011:97). Uji validitas ini adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan korelasi antarskor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Alat ukur mempunyai nilai validitas yang tinggi apabila dapat menjalankan fungsinya dengan tepat dan memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan tujuan pengukuran.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis, yang menghitung koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya, dengan menggunakan prosedur statistik *Pearson's Product Moment Correlation* (Yani, 1999:28) dengan taraf signifikansi 5% dan dengan bantuan program komputer SPSS Ver 15.00. Valid tidaknya suatu item instrumen diperoleh dari hasil antara item yang dikorelasikan dengan skor total kemudian dibandingkan dengan nilai kritis r yang tercantum pada bagian paling bawah *critical value*. Jika nilai korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai kritis r (r tabel) maka item tersebut dikatakan valid. Menurut Ghazali (2013:53) uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= $n-2$, dimana n adalah jumlah responden dan angka 3 adalah jumlah variabel. Besarnya df adalah $39-2=37$, nilai r tabel adalah 0,316.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Azwar (2012:110) mengemukakan reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi suatu instrumen pengukur adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah-ubah. Reliabilitas ditentukan atas dasar proporsi varian total yang merupakan varian total sebenarnya. Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus α , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1 sampai 5 dan untuk mencari reliabilitas instrumen yang hasil skornya bukan bernilai 1 dan 0, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik formula *Alpha Cronbach* dengan

menggunakan Program *SPSS 15.0 for Windows*. Menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2013:48) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Ghozali (2013:47) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Berikut adalah kriteria besarnya koefisien reliabilitas.

Tabel 3.2 Indeks kriteria reliabilitas

No	Interval <i>Cronbach Alpha</i>	Kreteria
1.	$0,00 < r_{11} \leq 0,20$	Sangat rendah
2.	$0,20 < r_{11} \leq 0,40$	Rendah
3.	$0,40 < r_{11} \leq 0,60$	Cukup
4.	$0,60 < r_{11} \leq 0,80$	Tinggi
5.	$0,80 < r_{11} \leq 1,00$	Sangat tinggi

Sumber: Arikunto (2006: 276)

Berdasarkan kriteria tersebut, maka suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* $> 0,6$.

3.8 Metode Analisa Data

Tahap analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang terkumpul. Morissan (2012:27) dan Sugiyono (2013:244) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode statistik non parametrik karena data yang didapat dari kuisioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval. Sehingga perlu adanya transformasi data, dari ordinal menjadi data interval, seperti yang

dikemukakan Hays (dalam Narimawati, 2011:47) serta Riduwan dan Kuncoro (2007:30) maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui "*Method Of Succesive Interval*". Hal ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik.

Dengan dilakukannya transformasi data, diharapkan data ordinal sudah menjadi data interval dan memiliki sebaran normal yang langsung bisa dilakukan analisis dengan statistik parametrik.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, yakni Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas Uji Autokorelasi dan Uji Heterosdastisitas.

1. Uji Normalitas

Ghozali (2006:147) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mengetahui normalitas residual adalah melalui analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik P-Plot. Pada analisis grafik Histogram, apabila tampilan grafik membentuk gambar seperti lonceng maka model regresi memenuhi syarat normalitas. Sedangkan menjelaskan menggunakan analisis grafik *Normal P-Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Normalitas dapat juga menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov yang menjelaskan bahwa nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal apabila nilai *sig* lebih besar dari alfa (5%).(Suliyanto, 2011:75). Jika uji normalitas tidak terpenuhi, maka sebuah model regresi pada nilai hasil prediksi yang diperoleh akan bias dan tidak akan konsisten/bisa berubah dan uji statistik menjadi tidak valid atau bias terutama untuk sampel kecil.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah ada variabel yang saling berkorelasi pada variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinieritas sehingga model regresi tidak dapat digunakan, variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga (Ghozali, 2006:95). Untuk mengamati adanya multikolinieritas adalah dengan menganalisis nilai toleransi dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Toleransi mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10. Adapun apabila terjadi Multikolinieritas maka akibatnya adalah:

- a. nilai varians besar, maka standar error besar sehingga jarak nilai kepercayaan lebar;
- b. nilai uji t tidak signifikan dan ini terlihat lebih kecil dari nilai t tabel;
- c. tanda (*sign*) parameter cenderung bisa berlawanan;
- d. nilai R^2 tinggi, tetapi banyak variabelnya tidak signifikan

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda baik pada waktu atau respondennya. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya

korelasi antara data dalam variable penelitian pada model linier regresi berganda. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada penyakit autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi.

Pada penelitian ini, Uji Durbin Watson adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung terletak di daerah “Tidak Ada Autokorelasi Positif dan Negatif” atau mendekati angka 2 (Rietveld dan Sunaryanto,1994). Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson (DW test), kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. apabila nilai DW terletak diantara batas bawah dan batas atas ($dL < d < dU$) atau DW terletak diantara $4-dU$ dan $4-dL$ ($4-dU < DW < 4-dL$), hasilnya tidak dapat disimpulkan karena berada pada daerah yang tidak meyakinkan (*inconclusive*).
- b. apabila nilai DW melampaui $4-dL$ ($DW > 4-dL$ berarti ada autokorelasi negatif.
- c. apabila nilai DW terletak antara antara batas atas dan $4-dU$ ($du < DW < 4-dU$), berarti tidak terdapat autokorelasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi perlu dikemukakan hipotesis dalam bentuk sebagai berikut:

H_0 : Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan;

H_a : Tidak Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Menurut Suliyanto (2011:140), akibat yang ditimbulkan apabila terjadi autokorelasi pada hasil penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Nilai *variance* dan kesalahan baku yang akan digunakan untuk peramalantidak akan efisien.
- b. Hasil uji t dan uji F tidak lagi sah, apabila diterapkan, maka dapat memberikan kesimpulan yang menyesatkan mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

- c. Nilai R^2 yang dihasilkan akan lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga nilai R^2 tidak dapat dipercaya.
- d. Formulasi untuk menghitung *error variance* akan bias karena estimator (penaksir) akan mengestimasi terlalu rendah (*underestimate*).

Penaksir memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, penaksir menjadi sensitif atau ragu terhadap fluktuasi penyampelan

4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013:139) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Akibat terjadinya heteroskedastisitas maka setiap terjadi perubahan pada variabel terikat mengakibatkan errornya (*residual*) juga berubah sejalan atau kenaikan atau penurunannya. Dengan kata lain konskuensinya apabila variabel terikat bertambah maka kesalahan juga akan bertambah.

3.10 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Gujarati (dalam Ghazali, 2013:95) analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas (independen), dimana tujuannya untuk mengestimasi rata-rata variasi terikat berdasarkan nilai variabel bebas serta mengetahui pengaruh antara variabel-variabel penelitian, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara statistik

menggunakan analisis regresi berganda, hal mana persamaannya adalah sebagai berikut.

$$[Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + \varepsilon] \text{ (dalam Suliyanto, 2011:54).}$$

Dimana:

- Y = Variabel kinerja petugas UPK PNPM-MPd yang diramalkan
- a = *Intercept* (konstanta)
- X₁ = Variabel akuntabilitas
- X₂ = Variabel transparansi
- b₀ = Konstanta
- b₁ = Koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas
- b₁ = Koefisien regresi untuk variabel transparansi
- X_n = Variabel bebas k n
- ε = Nilai residu.

Langkah yang harus dilakukan sebelum memproses analisis regresi, pertama adalah perlu dilakukannya transformasi data dengan menggunakan *Methodes Succesful Interval* (MSI) yang nantinya akan dianalisis dengan statistik parametrik, dan yang kedua dilakukannya pengujian asumsi klasik yang akan menjelaskan apakah terjadi penyimpangan pada model regresi ini.

3.11 Uji Hipotesis

a. Uji Regresi secara simultan/bersama-sama (*F test*)

Menurut Sugiyono (2008:264) uji F digunakan untuk menguji variabel variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Selain itu, dengan uji F ini dapat diketahui pula apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah tepat atau belum. Pengujian secara menyeluruh untuk mengetahui apakah secara serentak koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Gujarati (2001:190) menjelaskan bahwa untuk uji F digunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)(n - k - 1)}.$$

Dimana:

R² = Koefisien determinasi.

K = Jumlah variabel.

n = Jumlah sampel.

Pengujian dengan uji F dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf signifikan sebesar 95%. Apabila F hitung lebih besar F tabel atau ($F_{hit} > F_{tabel}$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa model analisis yang digunakan adalah sesuai dengan hipotesis, sebaliknya apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau ($F_{hit} < F_{tabel}$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa model analisis yang digunakan adalah tidak sesuai dengan hipotesis.

b. Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh keeratan/kekuatan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti keeratan/kekuatan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin rendah.

Dapat juga dikatakan bahwa Koefisien determinasi (R^2) dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

Rumus dari koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut.

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y}{\sum y^2}$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi.

b_1, b_2 : Koefisien regresi.

X_1, X_2 : Variabel independen.

Y : Variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur ketepatan dari model analisis yang dibuat. Apabila pada hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi yang tinggi, hal itu baik sekali, namun apabila diperoleh nilai yang rendah maka hal ini bukan berarti bahwa model analisis yang digunakan merupakan model analisis yang jelek. Peneliti tidak menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) karena pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas, sedangkan penggunaan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*) untuk regresi harus lebih dari dua variabel bebas. (Santoso, 2001:354)

c. Uji Parsial (*t test*)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan ($\alpha = 5\%$) maka kita menerima hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t juga dilihat dari tabel "Coefficient". Dalam perhitungan ini penulis menggunakan fasilitas Program SPSS Ver. 15.00.

Uji t ini dilakukan dengan cara membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y). Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara parsial mampu memberikan penjelasan terhadap variasi pada variabel terikatnya.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Latar Belakang PNPM Mandiri

PNPM Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini berupaya untuk menciptakan/meningkatkan kualitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait pada upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan. PNPM Mandiri merupakan salah satu dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang berdasarkan pembelajaran terbaik pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat selama ini. Selain program-program berbasis pemberdayaan, masih terdapat program penanggulangan kemiskinan lainnya yang diperuntukkan langsung bagi rumah tangga miskin, seperti Program Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dan Program Keluarga Harapan, serta program-program terkait penyediaan kredit mikro dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP).

PNPM Mandiri juga diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah

daerah misalnya Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dan sebagainya. PNPM Mandiri “lahir” dari adanya kebutuhan untuk mengharmonisasi program-program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sehingga PNPM merupakan “nama generik” atau “payung” bagi sejumlah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh lebih dari 19 departemen atau sektor. Selama ini, masing-masing program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dari semua sektor berjalan secara parsial. Satu program dengan program lain tak ada keterkaitan, sehingga efektivitasnya kurang dapat dirasakan oleh masyarakat penerima (*beneficiaries*).

Pelaksanaan PNPM Mandiri memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak terutama dari aparat pemerintah daerah. Hal demikian diperlukan untuk menjamin keberlanjutan hasil yang dicapai. Guna memperoleh dukungan dan keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan upaya-upaya memberikan pemahaman mengenai kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil PNPM Mandiri melalui kegiatan komunikasi dan sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, disamping upaya untuk mengkomunikasikan aspek-aspek konsep dan program PNPM Mandiri, juga diperlukan langkah komunikasi yang menyeluruh untuk memberikan pemahaman mengenai PNPM Mandiri sebagai upaya menanggulangi kemiskinan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemanfaat PNPM Mandiri adalah:

- a. kelompok masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan (termasuk kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat rentan lainnya);
- b. kelembagaan masyarakat di pedesaan dan perkotaan;
- c. pemerintah lokal.

4.1.2 Kronologis Pembentukan PNPM Mandiri

Terbentuknya program pemberdayaan masyarakat yang menyangkut beberapa sektor kehidupan ini terproses dengan melibatkan beberapa koordinator kementerian pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adapun

kronologis pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 23 Mei 2006 terjadi rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait yang memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dimana pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu wadah Program Nasional. Salah satu kesepakatannya diantaranya adalah mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua Kementrian dan Lembaga (K/L) termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.
2. Pada Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 yang membahas khusus tentang Penanggulangan Kemiskinan, presiden menetapkan kebijakan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum untuk mengatasi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja sepakat mengajukan nama program yang bernama “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)”.
4. Pada 12 September 2006 beberapa menteri koordinator seperti Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Menko Kesra menindaklanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada TA 2007.

6. Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri.
7. Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.
9. Pada Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal, dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia, PNPM-PIIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (*Rural Infrastructure Services*), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dengan pinjaman dari ADB, dan PNPM-PISEW/RISE (Program Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah/*Rural Infrastructure for Social and Economic Activities*), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, dan Bappenas, dengan pinjaman dari JICA/JBIC.

Kelima program dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (*Core*) artinya program yang membangun sistem, proses dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa. Sejak Tahun 2008, maka dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu:

1. PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan), dikelola oleh Kementerian Pertanian;
2. PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. PNPM – Pariwisata, dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
4. PNPM-Permukiman, dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Selain itu juga dikembangkan skema PNPM yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu dan ditambahkan pada PNPM inti yang dikelola oleh K/L pengelolanya, yaitu:

- a. PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak dan pendidikan keluarga) dikelola oleh Ditjen. PMD, Kemendagri, mendapat bantuan hibah dari Ausaid/PSF;
- b. PNPM Hijau (Green KDP), ditambahkan pada lokasi PNPM Perdesaan, dikelola oleh Ditjen. PMD, Depdagri, mendapat pendanaan dari Multidonor *PNPM Support Facility* (PSF);
- c. PNPM-Peduli, PNPM yang diperuntukkan bagi Kelompok masyarakat rentan (korban trafficking, PSK, transgender, anak yatim, para janda kepala keluarga, penyandang cacat, KAT, penderita HIV/AIDS, penderita Lepra, pecandu narkoba, kelompok marginal lainnya), dikelola oleh LSM yang diseleksi, mendapat pendanaan dari Multidonor PSF.

4.1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya berdasarkan pada Sistem Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi yang mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
 - a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan;

- c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- 2) Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:
- a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - b Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - c Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
 - d Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - e Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 - f Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 3) Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:
- a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 - c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau

Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597)
f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;

- f Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah;
- h Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Dasar Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Sebagai salah satu Program Inti dari PNPM Mandiri, maka dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sama dan merujuk pada Dasar Hukum PNPM Mandiri, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri, Peraturan Presiden Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

4.1.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau *Rural* PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau *Rural* PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/

kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per-kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

4.1.4.1 Prinsip Pokok PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri sebagai berikut.

1. **Transparansi dan akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif.
2. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
3. **Keberpihakan pada orang/ masyarakat miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

4. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
6. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
9. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Selain prinsip-prinsip di atas, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni sebagai berikut.

10. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
11. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK Aku Lanjut dengan *tagline*: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang

mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud.

4.1.4.2 Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui fórum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan.
2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.
3. Perencanaan partisipatif di tingkat dusun, desa dan kecamatan.

Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan ketentuan satu laki-laki, satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk mengagas masa depan desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM

Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

4. Seleksi/prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (*negative list*). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka.
Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat.
6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan.
Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir,

dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3)

4.1.4.3 Penyaluran dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk *trust funds* dan hibah dari berbagai negara/ lembaga penyandang dana. Hibah/*trust funds* tersebut merupakan wujud

dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

4.1.5 UPK Kecamatan Pada PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat selalu berorientasi pada perencanaan, pelaksanaan beserta pelestariannya programnya. Proses ini akan berjalan apabila didukung oleh unit-unit atau pelaku-pelaku pelaksana program, di antaranya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berperan sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa di tingkat kecamatan. Sejalan dengan penataan kelembagaan kerjasama antar desa yang sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta tuntutan profesionalitas kinerja organisasi, maka kepengurusan dalam UPK perlu disesuaikan dengan koridor kebijakan. UPK menjalankan dan mengembangkan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi pengembangan partisipasi masyarakat, serta penguatan dan pembinaan kelompok. Kedudukan UPK perlu dikuatkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitan hubungan dengan kelembagaan desa dan antar desa lainnya, bahkan kerja sama dengan pihak lain.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada PNPM Mandiri Perdesaan bukanlah organisasi yang dapat disamakan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), meskipun dalam arah tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat semata. Lembaga Swadaya Masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi nonpemerintah yang independen dan mandiri serta didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada [masyarakat](#) umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya, oleh karena nonpemerintah maka bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.

Beda halnya dengan UPK, dimana unit kegiatan tersebut didirikan oleh masyarakat, pengurus harian UPK dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rapat tertinggi Musyawarah Antar Desa (MAD). Selanjutnya Pengurus UPK (baik pengurus harian maupun

pengelola unit kegiatan-sektor usaha produktif di UPK) dapat diberhentikan secara langsung (tanpa melalui peringatan) dan secara tertulis (melalui Surat Keputusan) oleh BKAD sebelum akhir periode UPK. Perbedaan lagi tentang persyaratan untuk menjadi anggota atau pengurus maupun anggota UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan, sedangkan hal ini tidak terjadi pada persyaratan untuk menjadi anggota LSM

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Situbondo berjumlah 14 UPK, 13 UPK lokasi aktif dan 1 UPK lokasi *phase out* (Kec. Panarukan). Seluruh UPK termasuk UPK Kecamatan Panarukan masih aktif melakukan kegiatan *microfinance*.

Tugas dan tanggung jawab UPK diantaranya adalah:

1. bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;
2. bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
3. bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
4. bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
5. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
6. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
7. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
8. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;

9. membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhannya. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
10. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan kebutuhan;
11. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
12. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
13. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
14. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
15. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
16. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
17. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

4.1.6 Tugas Pengurus Harian dan Struktur UPK Kecamatan PNPM-MPd

Dalam pelaksanaan tugas harian khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, setiap pengurus UPK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.

A. Ketua UPK

1. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.
2. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
3. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
4. Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
5. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
6. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
7. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.

B. Bendahara UPK

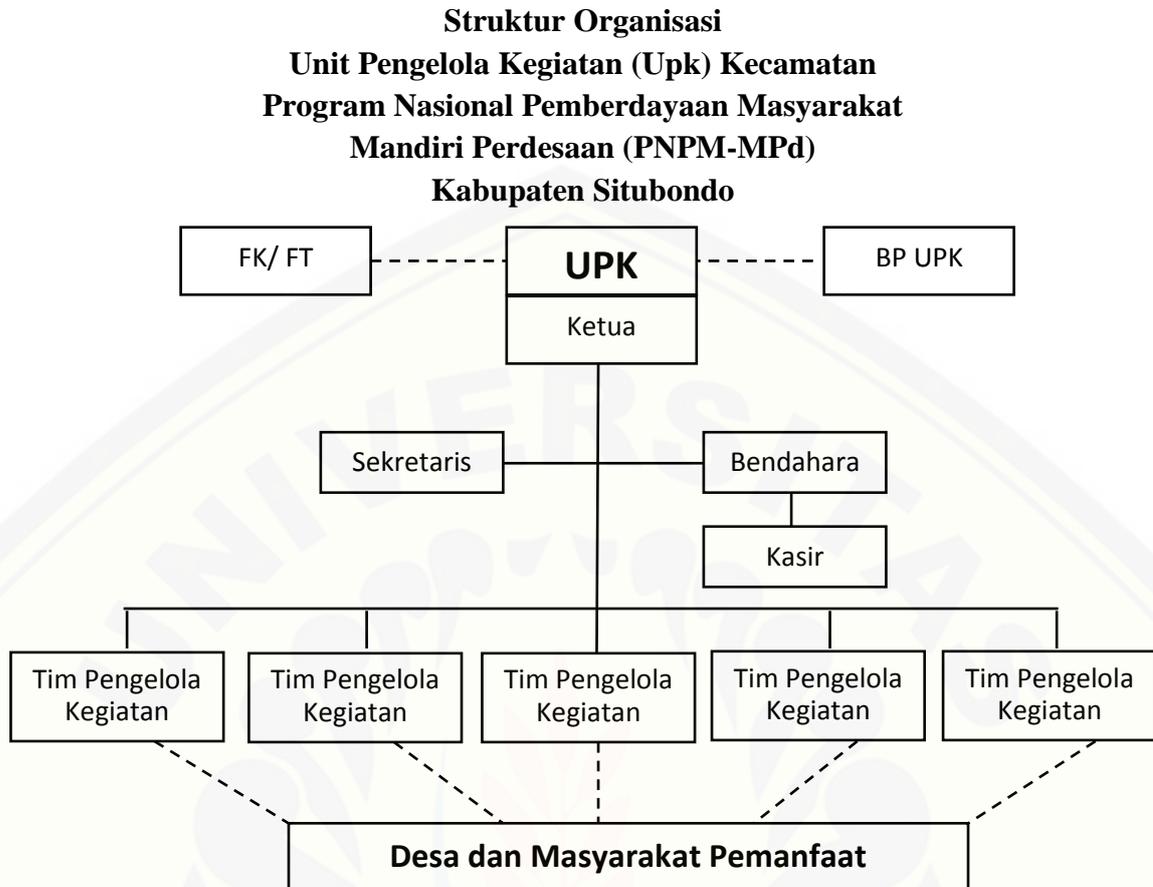
1. Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.
2. Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.
3. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi.
4. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan.
5. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.
6. Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan keuangan
7. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK.
8. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.

C. Sekretaris UPK

1. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor
2. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
3. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).
4. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

Pengurus harian ini memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pertama mengelola kegiatan reguler PNPM Mandiri perdesaan termasuk mengelola dan menyalurkan dana BLM (DOK dan Kegiatan) serta kedua mengelola dan membawahi seluruh sub-sub unit kegiatan/sector-sector usaha produktif yang dibentuk dan dikembangkan dalam UPK, termasuk yang sekarang sudah ada (pinjaman dana bergulir).

Untuk UPK yang asset dana bergulirnya sudah mencapai 2 milyar, dibentuk sub unit perguliran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UPK, yang bertugas mengelola kegiatan dana bergulir. Sub unit ini terdiri dari minimal 1 orang yang dipilih seperti halnya pengurus UPK lainnya. Selain dijelaskan tugas pelaksanaan harian bagi pengurus UPK, maka perlu juga untuk dijelaskan tentang struktur organisasi kelembagaan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) seperti yang pada gambar di bawah ini.



Sumber: Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo (2012)

4.1.6.1. UPK Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan di Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pasir Putih yang terletak di posisi antara $7^{\circ} 35'$ - $7^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 30'$ – $114^{\circ} 42'$ Bujur Timur. Kabupaten Situbondo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 hektar, dan bentuknya memanjang dari barat ke timur kurang lebih 150 km. Pantai utara umumnya merupakan dataran rendah dan di sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan rata-rata lebar wilayah kurang lebih 11 km. Kabupaten Situbondo terdiri dari 17 kecamatan. Kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak

621.829 jiwa, dengan 97.586 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian sebagian besar warga di kecamatan ini adalah petani/pedagang.

Awal dari program pembangunan masyarakat berbasis pemberdayaan dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Fase I mulai dilaksanakan di kabupaten Situbondo sejak tahun 2001 hingga Agustus 2002 yang berlangsung selama 1 tahun, dalam pelaksanaannya menjangkau 3 kecamatan dan 21 desa, dengan total nilai alokasi dana BLM sebesar Rp. 2.500.000.000. Selanjutnya, PPK Fase II sebagai kelanjutan dari PPK Fase I mulai dilaksanakan sejak bulan Pebruari tahun 2003 hingga Pebruari tahun 2005. Dalam pelaksanaannya pada setiap tahun anggarannya dinamai dengan istilah Siklus 4 untuk T.A. 2003, Siklus 5 untuk TA. 2004.

Pada tahun anggaran 2006, Kabupaten Situbondo kembali mendapatkan kelanjutan dari pelaksanaan PPK sebelumnya dengan istilah PPK Fase III selama 3 siklus yakni PPK-3 Siklus 7, PPK-3 Siklus 8 dan PPK-3 Siklus 9 yang dimulai sejak bulan Pebruari 2006 dan berakhir bulan Mei 2007 untuk PPK-3 Siklus 8 dan bulan April 2007 untuk PPK-3 Siklus 9. Selanjutnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998 diadopsi menjadi PNPM Mandiri Perdesaan (M-Pd). Pada tahun 2007 di Kabupaten Situbondo mendapat kelanjutan program berupa pengintegrasian PPK ke dalam PNPM dengan lokasi berjumlah 4 kecamatan.

Pada tahun anggaran 2008 kabupaten Situbondo mendapat kelanjutan program dengan bertambahnya lokasi menjadi 6 kecamatan. Memasuki tahun anggaran 2009 kabupaten Situbondo mendapat kelanjutan program dengan bertambahnya lokasi menjadi 10 kecamatan Program PNPM Mandiri Perdesaan. Tahun 2010 sampai dengan 2013, di Kabupaten Situbondo, terdapat 13 kecamatan yakni Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih pada 106 desa.

Secara ringkas besaran alokasi dana BLM (Bayar Langsung Masyarakat) dalam pelaksanaan PPK dan PNPM Mandiri sampai dengan tahun 2013 di kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Dana Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo Tahun 2001 – 2013.

NO	TAHUN ANGGARAN	ALOKASI DANA BLM		TOTAL
		APBN (80%)	APBD (20%)	
1	2001/2002	2.500.000.000,-	-	2.500.000.000
2	2003	2.500.000.000,-		2.500.000.000
3	2004	2.500.000.000,-	-	2.500.000.000
4	2006	2.000.000.000	500.000.000	2.500.000.000
5	2007	6.000.000.000	1.500.000.000	7.500.000.000
6	2008	8.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000
7	2009	16.720.000.000	4.180.000.000	20.900.000.000
8	2010	26.400.000.000	6.600.000.000	33.000.000.000
		1.500.000.000		
9	2011	24.880.000.000	6.220.000.000	31.100.000.000
		4.350.000.000		
10	2012	26.100.000.000	2.900.000.000	29.000.000.000
11	2013	21.150.000.000	2.350.000.000	23.500.000.000
JUMLAH		144.600.000.000	26.250.000.000	170.850.000.000

Sumber: Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo tahun 2013.

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa dana BLM yang diterima dari tahun 2001 hingga tahun 2013 pada kegiatan PPK yang selanjutnya PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp. 170.850.000.000,-. Khusus tahun 2010 terdapat 2 UPK (Kecamatan Panji dan Arjasa) yang juga mengelola BLM paska krisis, dengan total dana Rp.1.500.000.000,- sedangkan tahun 2011 terdapat 8 UPK (Kecamatan Panji, Arjasa, Jatibanteng, Sumbermalang, Suboh, Mlandingan, Banyuputih, dan Besuki) dengan total dana Rp. 4.350.000.000

4.1.6.2 Visi dan Misi UPK Kecamatan

A. Visi PNPM Mandiri Pedesaan.

Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

B. Misi PNPM Mandiri Pedesaan.

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya.
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.

3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

4.1.6.3 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara umum dibedakan menjadi 2 tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum PNPM-Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya badan kerja sama antar desa (BKAD).
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

4.1.6.4 Identifikasi Responden

Berdasarkan hasil penelitian di lapang, diperoleh data responden pelaku PNPM Mandiri Perdesaan khususnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terdiri dari pengurus Ketua, Sekretaris dan

Bendahara pada 13 kecamatan (kecuali UPK Kecamatan PNPM-MPd Panarukan yang dinyatakan *Pash Out*) adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Identifikasi Responden.

No	Nama	Jabatan	L/K	Umur	Pendidikan	UPK
1.	Saiful Haq, SH	Ketua	L	37	S-1	Sumber Malang
2.	Agus Fadal	Sekretaris	L	37	SLTA	
3.	Indah Siska Aprilia	Bendahara	P	26	S-1	
4.	Suraji	Ketua	L	43	S-1	Jatibanteng
5.	Diatul Amalya	Sekretaris	P	25	SLTA	
6.	Kriptiana	Bendahara	P	27	S-1	
7.	Enik Trisnawati	Ketua	P	30	S-1	Banyu Glugur
8.	Nur Fadhila	Sekretaris	P	34	S-1	
9.	Novisa Dian Pratiwi	Bendahara	P	28	S-1	
10.	Abdul Hannan	Ketua	L	35	Diploma	Besuki
11.	Ana Ghayakul Kiswah	Sekretaris	P	23	Diploma	
12.	Buhoriyanto	Bendahara	L	25	SLTA	
13.	Trihayati	Ketua	P	46	SLTA	Suboh
14.	Ahmad Kholid	Sekretaris	L	34	SLTA	
15.	Pakma	Bendahara	P	48	SLTA	
16.	Masturi	Ketua	L	36	S-1	Mlandingan
17.	Ali Wafa	Sekretaris	L	29	S-1	
18.	Tika Siti Y	Bendahara	P	25	SLTA	
19.	Zaenun Aksan	Ketua	L	46	SLTA	Bungatan
20.	Achmad S.	Sekretaris	L	27	SLTA	
21.	Widya Ningsih	Bendahara	P	23	SLTA	
22.	Angwari	Ketua	L	28	SLTA	Kendit
23.	Ilyas, S.PdI	Sekretaris	L	30	S-1	
24.	Erwin Wahyudi	Bendahara	L	33	S-1	
25.	Muh.Babunjan	Ketua	L	24	SLTA	Panji
26.	Ahmad S. Qomar	Sekretaris	L	27	S-1	
27.	Halifatur Rosidah	Bendahara	P	39	SLTA	
28.	Fathor Rahman	Ketua	L	33	SLTA	Kapongan
29.	Vigitia G Dinata	Sekretaris	P	26	S-1	
30.	Nur R. Jamil, SE	Bendahara	P	27	S-1	
31.	Yudha Candra Ch	Ketua	L	24	S-1	Arjasa
32.	Sri Ayudha	Sekretaris	P	32	Diploma	
33.	Dwi Arik Budiono	Bendahara	L	25	SLTA	
34.	Abdurakhman	Ketua	L	44	S-1	Jangkar
35.	Tatik Nur Hidayah	Sekretaris	P	31	S-1	
36.	Ida Herawati	Bendahara	P	33	SLTA	
37.	M Imam TR.	Ketua	L	29	S-1	Banyuputih
38.	Hasanah	Sekretaris	P	32	Diploma	
39.	Anita Wulandari	Bendahara	P	27	S-1	

Sumber: Data yang terkumpul, 2014 (berdasarkan SK Bupati No.188/443/P/006.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014)

4.2 Karakteristik Responden

Karena unit analisis penelitian ini adalah organisasi, maka sebagai responden dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus inti (terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di 13 wilayah kecamatan Kabupaten Situbondo yang terdiri UPK Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih, secara keseluruhan jumlah responden adalah 39 orang. Dengan menjelaskan karakteristik responden ini maka akan diperoleh hubungan yang jelas antara karakteristik dengan keberhasilan operasional pelaku yaitu UPK PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat.

Berikut ini disajikan deskripsi responden yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai data demografi responden yaitu tingkat pendidikan, masa kerja, dan golongan.

1. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi maupun individu. Semakin tinggi pendidikan seseorang, umumnya akan semakin tinggi kreativitas dan kemampuannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya. Berikut ini disajikan distribusi pendidikan pelaku UPK Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SLTA	16	41
2	Diploma (S-0)	4	10
3	Sarjana (S-1)	19	49
	Total	39	100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2014

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dilihat dari latar belakang pendidikannya, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan sarjana (S-1) yaitu sebanyak 49%, sedangkan SLTA sebanyak 41 %, dan Diploma (S-0) sebanyak 10%. Komposisi di atas menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang dalam organisasi yakni petugas Unit Pengelola Kegiatan

(UPK) Kecamatan pada PNPM MPd secara umum sudah baik. Tingkat pendidikan petugas sangat mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan transformasi pengetahuan dan nalar tentang program maupun pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Identifikasi Berdasarkan Umur

Berdasarkan identifikasi menurut umur akan dilihat umur para responden UPK Kecamatan PNPM MPd di Kabupaten Situbondo. Dalam melakukan identifikasi menurut umur, dapat dibuat klasifikasi seperti pada tabel berikut ini di bawah ini.

Tabel 4.4 Umur Responden.

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	< 25 tahun	8	21
2	26 – 35 tahun	22	56
3	36 – 45 tahun	6	15
4	> 45 tahun	3	8
Jumlah		39	100

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2014

Responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur 26 sampai 35 tahun (56%) hal mana semuanya adalah usia produktif dan enerjik, termasuk juga kuantitas mobilisasi di masyarakat pada pelaksanaan program akan lebih maksimal. Dilihat dari segi umur menggambarkan bahwa pelaku PNPM MPd seperti UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo rata-rata memiliki keinginan yang cukup kuat untuk terus bekerja khususnya pada program pemberdayaan masyarakat.

3. Identifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan UPK

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin dan jabatan yang dimiliki oleh responden pada Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM MPd di Kabupaten Situbondo akan dilihat jumlah distribusi pengurus UPK laki-laki dan perempuan, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Jenis Kelamin dan Jabatan Responden.

No	Jabatan/Jenis Kelamin	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Jumlah
1	Ketua	11 (28%)	2 (5%)	13 (33%)
2	Sekretaris	6 (15%)	7 (18%)	13 (33%)
3	Bendahara	4 (10%)	9 (23%)	13 (33%)
	Jumlah	21 (56%)	18 (46%)	39 (100%)

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2014

Jumlah responden laki-laki terlihat lebih banyak yakni sebesar 11 orang (28%) mempunyai jabatan sebagai ketua UPK, selanjutnya jumlah perempuan sebesar 2 orang atau 5%. Jumlah responden perempuan lebih banyak pada jabatan bendahara yakni 9 orang (23%) melebihi responden laki-laki yakni berjumlah 4 orang atau 10%. Untuk jabatan sekretaris antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan berimbang, yaitu 6 orang laki-laki (15%) dan perempuan sebanyak 7 orang atau 18%. Dominasi jumlah laki-laki untuk posisi jabatan ketua karena sebagai pemimpin organisasi (UPK) harus tahan fisik dan mental pada proses pengambilan keputusan, hal tersebut juga mengingat program ini banyak berkiprah di lapang. Sedangkan pada jabatan bendahara didominasi perempuan, karena kebanyakan perempuan sangat cermat dan teliti serta hemat dalam pengeluaran uang yang akan dibelanjakan atau dikeluarkan pada setiap kegiatan, khususnya pada PNPM Mandiri Perdesaan

4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam upaya untuk mencapai dan menciptakan kondisi yang baik dan kondusif serta terintegrasi pada aktifitas organisasi, maka diperlukan adanya persamaan pemahaman dan kepentingan seseorang sebagai pelaku pada organisasi, dengan mengacu pada aturan-aturan organisasi yang telah ditetapkan.

Di samping itu, keberhasilan organisasi juga terwujud ketika organisasi yang bersangkutan telah melaksanakan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah setiap pelaku organisasi baik itu organisasi publik (pemerintah), swasta, LSM maupun organisasi sektor publik lainnya termasuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) di Kabupaten Situbondo harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip *good governance* beserta pelaksanaannya. Di antara prinsip-prinsip *good governance* tersebut

adalah akuntabilitas hal mana di dalamnya menyangkut pada akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, akuntabilitas program, prinsip lainnya adalah transparansi yang menjelaskan tentang penguatan transparansi termasuk masalah prosedur, penyediaan serta mekanisme yang berkaitan dengan program, kedua prinsip tersebut yang akan berimplikasi terhadap peran, kinerja, kualitas laporan keuangan dan administrasi beserta pelaksanaan program yang dihasilkannya sehingga akan dapat meningkatkan kinerja organisasinya dan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Dalam deskripsi variabel penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil analisis data. Sesuai dengan model analisis, variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas (X_1) yang diukur dengan 5 item yang terdiri dari 22 pertanyaan dan transparansi (X_2) yang diukur dengan 5 item yang terdiri dari 9 pertanyaan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja UPK Kecamatan (Y) yang diukur dengan 5 item yang terdiri dari 11 pertanyaan. Berikut ini disajikan distribusi frekuensi jawaban responden atas jawaban dari masing-masing variabel penelitian.

4.3.1 Akuntabilitas (X_1)

Variabel akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Indikator-indikator yang terdapat dalam variabel akuntabilitas adalah akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Adapun hasil distribusi responden berupa jawaban dari angket yang telah disebarakan dari masing-masing indikator variabel penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas hukum dan kejujuran.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total/(%)	
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	$X_{1,1}$	11	28,2	14	35,9	13	33,3	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	$X_{1,2}$	10	25,6	28	71,8	1	2,6	0	0,0	0	0,0	39	100
3.	$X_{1,3}$	16	41	21	53,8	2	5,1	0	0,0	0	0,0	39	100
4.	$X_{1,4}$	10	25,6	24	61,5	5	12,8	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan variabel akuntabilitas pada sub variabel akuntabilitas hukum dan kejujuran yang diukur dengan empat item pertanyaan dapat diketahui bahwa untuk indikator pertama ($X_{1.1}$) sebagian besar responden menyatakan setuju dan cukup setuju/netral yaitu sebanyak 35,9%, hal ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan pada PNPM MPd harus berdasarkan pada PTO (Petunjuk Teknis Operasional), sedangkan sebanyak 28,2% responden menyatakan sangat setuju. Ini menunjukkan bahwa segala aktifitas organisasi harus mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan PTO yang ada.

Untuk jawaban pada indikator kedua ($X_{1.2}$) menjelaskan bahwa 71,8% menyatakan setuju bahwa penggunaan sumber dana publik harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yakni PTO (Petunjuk Teknis Operasional). Selanjutnya sebanyak 25,6% responden menyatakan sangat setuju dan 2,6% menyatakan netral, hal ini menunjukkan bahwa segala penggunaan dana untuk kegiatan program PNPM MPd, UPK Kecamatan harus mengacu pada peraturan yang ada yakni PTO (Petunjuk Teknis Operasional). Jawaban responden pada indikator ketiga ($X_{1.3}$) menjelaskan bahwa terdapat 53,8% menyatakan setuju dan sebanyak 41% responden menyatakan sangat setuju serta sebanyak 5,1% menyatakan netral bahwa setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan harus berlandaskan pada peraturan organisasi yang telah ditetapkan.

Pada jawaban indikator keempat ($X_{1.4}$) menyatakan bahwa sebanyak 61,5% responden menyatakan setuju, sebanyak 25,6% menyatakan sangat setuju dan 12,8% menyatakan netral bahwa setiap pelaksanaan kegiatan organisasi (UPK Kecamatan) dilaksanakan secara baik, sehat untuk menghindari segala macam penyalagunaan jabatan yang akan merusak organisasi yang akhirnya akan menurunkan kinerja organisasi.

Tabel 4.7 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas manajerial

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	X _{1.5}	17	43,6	18	46,2	3	7,7	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	X _{1.6}	2	5,1	13	33,3	14	35,9	10	25,6	0	0,0	39	100
3.	X _{1.7}	6	15,4	30	76,9	3	7,7	0	0,0	0	0,0	39	100
4.	X _{1.8}	17	43,6	19	48,7	1	2,6	1	2,6	1	2,6	39	100

Sumber: lampiran C

Pada tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel akuntabilitas pada sub variabel akuntabilitas manajerial yang diukur dengan empat item pertanyaan dapat diketahui bahwa untuk indikator kelima (X_{1.5}) sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 46,2%, sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 43,6 %, hal ini menunjukkan bahwa segala aktifitas organisasi selalu menggunakan dana operasional yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, meskipun ada esponden yang menjawab tidak setuju (sebesar 2,6%) hal ini menunjukkan bahwa masalah penggunaan dana operasional organisasi tetap berdasarkan pada peraturan organisasi. Jawaban untuk indikator keenam (X_{1.6}) menjelaskan bahwa sebanyak 35,9% responden menyatakan cukup setuju, yang menyatakan setuju sebesar 33,3% bahwa pada setiap organisasi pengelolaan organisasi harus dilakukan dengan biaya yang minimal. Adanya jawaban sangat setuju sebesar 5,1% dan 25,6% menyatakan tidak setuju, hal ini menggambarkan bahwa aktifitas organisasi yang begitu kompleks di lapang, sehingga dimungkinkan adanya biaya yang lebih untuk menunjang mobilitas pelaku program di lapang.

Sedangkan jawaban responden untuk indiktor ketujuh (X_{1.7}), sebagian besar menyatakan setuju yakni sebesar 76,9% hal ini menjelaskan bahwa hasil yang dicapai oleh organisasi UPK dalam kegiatan pelaksanaan PNPM MPd telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 15,4% dan yang netral/cukup setuju sebesar 7,7%, perbedaan ini dikarenakan antara kondisi dan dinamika tempat UPK yang berbeda.

Jawaban untuk indikator kedelapan (X_{1.8}), sebagian besar responden menyatakan setuju (48,7%), selanjutnya didukung oleh responden yang

menyatakan sangat setuju (43,6%) bahwa jika terjadi pembekakan keuangan dari hasil kegiatan program di lapang maka harus dipertanggungjawabkan, karena hal ini juga bertentangan dengan kesepakatan organisasi yang telah ditetapkan serta melebihi persediaan pengalokasian masing-masing dana. Sedangkan responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing masing sebesar 2,6%. Hal ini dimaklumi karena masing-masing lapang kondisinya berbeda satu sama lain, sehingga hal yang wajar apabila terdapat responden yang berpendapat netral, tidak setuju bahkan sangat tidak setuju apabila pembekakan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.8 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas program

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	X _{1.9}	19	48,7	18	46,2	1	2,6	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	X _{1.10}	4	10,3	27	69,2	7	17,9	1	2,6	0	0,0	39	100
3.	X _{1.11}	13	33,3	25	64,1	1	2,6	0	0,0	0	0,0	39	100
4.	X _{1.12}	16	41	21	53,8	2	5,1	0	0,0	0	0,0	39	100
5.	X _{1.13}	17	43,6	22	56,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Pada indikator kesembilan (X_{1.9}) terdapat 48,7% responden yang menyatakan setuju bahwa pelaksanaan PNPM MPd telah memberikan hasil yang optimal di masyarakat, dan yang mendukung sangat setuju sebanyak 46,2%. Yang menyatakan netral dan tidak setuju sekitar 2,6% artinya bahwa terdapat beberapa wilayah pada pelaksanaan PNPM MPd dianggap tidak optimal. Indikator kesepuluh (X_{1.10}) menggambarkan bahwa sebagian besar responden (69,2%) menyatakan setuju bahwa organisasi (UPK Kecamatan) bertanggung jawab pada setiap proses pengambilan keputusan pada setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat, responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10,3% sedangkan yang menjawab netral adalah 17,9%. Hanya 2,6% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa organisasi seperti UPK Kecamatan yang bertanggung jawab pada setiap proses pengambilan keputusan pada setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat.

Selanjutnya pada indikator kesebelas (X_{1.11}) menjelaskan bahwa sebagian besar responden (64,1%) menyatakan setuju bahwa UPK Kecamatan harus

bertanggung jawab pada setiap kegiatan di lapang sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang menyatakan sangat setuju (33,3%) dan yang menyatakan netral sebanyak 2,6% atau 1 responden. Pada indikator keduabelas menjelaskan bahwa sebagian besar dari responden (53,8%) menyatakan setuju bahwa strategi organisasi didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program yang dilakukan oleh UPK Kecamatan di masyarakat, yang menyatakan sangat setuju sebesar 41%, dan yang menyatakan netral sebesar 5,1%, hal ini dimungkinkan ada faktor lain yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan program, dan bukan hanya semata didukung oleh strategi organisasi.

Pada indikator yang ketigabelas ($X_{1.13}$) menjelaskan bahwa sebagian besar responden (56,4%) menyatakan setuju adanya keberhasilan pelaksanaan program oleh UPK didukung oleh program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebanyak 43% menyatakan sangat setuju, disini mengartikan bahwa segala macam program apapun, akan dapat berhasil apabila sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga secara berkelanjutan akan dapat didukung oleh masyarakat sekitarnya.

Tabel 4.9 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas kebijakan.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	$X_{1.14}$	16	41	19	48,7	3	7,7	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	$X_{1.15}$	17	43,6	20	51,3	2	5,1	0	0,0	0	0,0	39	100
3.	$X_{1.16}$	13	33,3	21	53,8	5	12,8	0	0,0	0	0,0	39	100
4.	$X_{1.17}$	17	43,6	19	48,7	2	5,1	1	2,6	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Selanjutnya pada indikator keempatbelas ($X_{1.14}$) menjelaskan bahwa sebagian besar responden (48,7%) menyatakan setuju bahwa UPK bertanggung jawab pada setiap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, selanjutnya responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 41%. Hanya 2,6% responden yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang menyatakan netral sekitar 7,7%. Indikator kelimabelas ($X_{1.15}$) menjelaskan bahwa sebagian besar dari responden (51,3%) menyatakan setuju bahwa setiap keputusan UPK pada setiap kegiatan selalu mempertimbangkan

sasaran program di masyarakat, hal ini didukung oleh responden sebanyak 43,6% yang menyatakan sangat setuju, sedangkan yang netral sebanyak 5,1%. Indikator keenambelas ($X_{1.16}$) menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (53,8) bahwa setiap keputusan UPK selalu mempertimbangkan dampak negatif hasil dari pelaksanaan program di masyarakat, didukung responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 33,3%, sedangkan responden yang menyatakan netral berkisar 12,8%. Hal ini berarti bahwa segala dampak yang terjadi di masyarakat sebagai hasil dari pelaksanaan program harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan, sehingga dapat dievaluasi untuk program selanjutnya. Pada indikator ketujuhbelas ($X_{1.17}$), ternyata sebagian besar responden menyatakan setuju (48,7%) bahwa keputusan UPK selalu mempertimbangkan manfaat dari pelaksanaan program di masyarakat, responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 43,6%. Responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 2,6%, artinya bahwa pelaksanaan program hanya sekedar untuk dilaksanakan tanpa melihat manfaat yang terjadi di masyarakat.

Tabel 4.10 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub variabel akuntabilitas finansial.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	$X_{1.18}$	11	28,2	25	64,1	3	7,7	0	0,0	0	0,0	39	100
2.	$X_{1.19}$	9	23,1	18	46,2	6	15,4	6	15,4	0	0,0	39	100
3.	$X_{1.20}$	13	33,3	25	64,1	1	2,6	0	0,0	0	0,0	39	100
4.	$X_{1.21}$	10	25,6	26	66,7	3	7,7	0	0,0	0	0,0	39	100
5.	$X_{1.22}$	17	43,6	19	48,7	3	7,7	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa indikator kedelapanbelas ($X_{1.18}$), ternyata sebagian besar responden (64,1%) menyatakan setuju bahwa penggunaan keuangan pada setiap pelaksanaan program sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan, artinya tidak boleh melebihi dari persediaan yang sudah ditetapkan, hal ini didukung oleh responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 28,2%, sedangkan yang menjawab netral sebesar 7,7%. Indikator kesembilanbelas ($X_{1.19}$) menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (46,2%) dan sebesar 23,1% menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan keuangan pada pelaksanaan program dilakukan secara minimal dengan hasil yang

maksimal. Responden yang menyatakan netral dan tidak setuju masing masing sebesar 15,4%, ini menunjukkan bahwa ada beberapa program yang penggunaan keuangan masih tidak berimbang antara penetapan keuangan dengan hasil kegiatan program di masyarakat. Untuk indikator kedua puluh ($X_{1.20}$) menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa setuju (64,1%) setiap penggunaan keuangan pada setiap pelaksanaan program harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, responden yang menjawab sangat setuju sebesar (33,3%), responden yang menjawab netral sebesar 2,6%. Indikator kedua puluh satu ($X_{1.21}$) menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (66,7%) bahwa adanya upaya dari organisasi (UPK Kecamatan) untuk menghindari penyalagunaan keuangan organisasi, responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 25,6%, dan responden yang menjawab netral sebesar 7,7%. Selanjutnya untuk indikator kedua puluh dua ($X_{1.22}$), sebagian besar responden menjawab setuju (48,7%) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan organisasi setiap hasil kegiatan program selalu dipublikasikan kepada masyarakat, hal ini didukung oleh responden yang menyatakan sangat setuju (43,6%), sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 7,7%.

4.3.2 Transparansi (X2)

Transparansi sering diidentikkan dengan keterbukaan, dapat diartikan sebagai suatu kebebasan seseorang/ komunitas secara langsung untuk memperoleh informasi termasuk yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk berpartisipasi dalam pengelolaan manajemen dan proses pengambilan keputusan suatu organisasi.

Tujuan transparansi adalah untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar, hal ini dilakukan secara terbuka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*) bagi setiap organisasi. Adapun hasil distribusi responden berupa jawaban dari angket yang telah disebarkan dari masing-masing indikator variabel penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, pembiayaan pada setiap rencana dan kegiatan PNPM-MPd di masyarakat.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	X _{2.1}	9	23,1	10	25,6	17	43,6	3	7,7	0	0,0	39	100
2.	X _{2.2}	14	35,9	25	64,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa indikator keduapuluhtiga (X_{2.1}), ternyata sebagian besar responden (43,6%) menyatakan cukup setuju bahwa organisasi (UPK Kecamatan) menyediakan informasi tentang prosedur tentang rencana kegiatan PNPM-MPd di masyarakat, responden yang menyatakan setuju sebesar 25,6% sedangkan yang menyatakan sangat setuju sebesar 23,1%. Indikator keduapuluhempat (X_{2.2}) menjelaskan bahwa sebagian besar responden (64,1%) menyatakan setuju bahwa UPK menyediakan/ mengumumkan informasi tentang pembiayaan kegiatan pelaksanaan PNPM-MPd di masyarakat, selanjutnya responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 35,9%.

Tabel 4.12 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Kemudahan akses informasi.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	X _{2.3}	18	46,2	19	48,7	2	5,1	0	0,0	0	0,0	39	100
2.	X _{2.4}	12	30,8	23	59	4	10,3	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan variabel transparansi pada sub variabel kemudahan akses informasi yang diukur dengan dua item pertanyaan dapat diketahui bahwa untuk indikator keduapuluhlima (X_{2.3}) sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 48,7%, selanjutnya responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 46,2 sedangkan yang menyatakan netral sebesar 5,1% yaitu organisasi (UPK Kecamatan) selalu memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai rencana dan hasil kegiatan. Indikator keduapuluhenam (X_{2.4}) sebagian besar responden menyatakan setuju (59%) yakni UPK selalu memberikan jalan keluar setiap ada kesulitan tentang pelaksanaan PNPM-MPd di masyarakat, responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 30,8 sedangkan yang menyatakan netral sebesar 10,3%.

Tabel 4.13 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Menyusun suatu mekanisme pengaduan.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	X _{2,5}	9	23,1	18	46,2	11	28,2	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	X _{2,6}	10	25,6	24	61,5	4	10,3	1	2,6	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan variabel transparansi pada sub variabel menyusun suatu mekanisme pengaduan yang diukur dengan dua item pertanyaan dapat diketahui bahwa untuk indikator keduapuluh tujuh (X_{2,5}) sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 46,2% bahwa UPK selalu menyusun prosedur tentang tata cara pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program, selanjutnya responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 23,1% sedangkan yang menyatakan netral sebesar 28,2%. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya sebesar 2,6%, ini menunjukkan bahwa penyusunan prosedur tentang tata cara pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program tidak perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan masyarakatnya. Untuk indikator keduapuluh delapan (X_{2,6}) perihal setiap pengaduan tentang hasil kegiatan organisasi pada PNPM-MPd dilakukan secara terbuka maka sebagian besar responden menyatakan setuju sebesar 61,5%, responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 25,6%, yang menyatakan netral sebesar 10,3%. Selanjutnya responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 2,6%.

Tabel 4.14 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub Meningkatkan arus informasi.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	X _{2,7}	12	30,8	18	46,2	8	20,5	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	X _{2,8}	9	23,1	17	43,6	12	30,8	1	2,6	0	0,0	39	100
3.	X _{2,9}	10	25,6	16	41	11	28,2	2	5,1	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Tabel 4.14 dapat menjelaskan bahwa variabel transparansi pada sub variabel meningkatkan arus informasi yang diukur dengan tiga item pertanyaan dapat diketahui bahwa untuk indikator keduapuluh sembilan (X_{2,7}) sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 46,2% bahwa UPK

menginformasikan tentang adanya situs penyedia jasa berupa email, blog, website yang dibuat untuk sarana informasi pada PNPM-MPd., selanjutnya responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 30,8% sedangkan yang menyatakan netral sebesar 20,5%. Responden yang menyatakan tidak setuju hanya sebesar 2,6%, ini menunjukkan bahwa ada beberapa responden yang masih belum mengetahui manfaat serta belum mampu menggunakan perangkat TI (Teknologi Informasi) sebagai akses yang mempercepat pertukaran dan penyampaian informasi. Untuk indikator ketigapuluh ($X_{2.8}$) perihal sarana teknologi untuk kecepatan merespon pengaduan dari masyarakat perihal kegiatan PNPM-MPd, ternyata sebagian besar responden menyatakan setuju sebesar 43,6%, sedangkan yang menjawab sangat setuju sebesar 23,1%. Responden yang netral sebesar 30,8%. Terdapat 2,6% responden yang menyatakan tidak setuju, hal ini dapat beralasan karena jaringan internet di desa masih belum maksimal. Selanjutnya indikator ketigapuluhsatu ($X_{2.9}$) sebagian besar responden menyatakan setuju (41%) perihal Organisasi (UPK Kecamatan) melibatkan media dan lembaga lain guna penyebaran informasi tentang kegiatan PNPM-MPd, sebanyak 28,2% responden menyatakan netral, sedangkan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25,6%. Terdapat 5,1% responden menyatakan tidak setuju tentang UPK Kecamatan melibatkan media dan lembaga lainnya dalam menyebarkan informasi, hal ini mungkin dikawatirkan justru pihak lain akan mencari keuntungan serta membawa kepentingan tertentu.

4.3.3 Kinerja UPK Kecamatan (Y)

Kinerja organisasi merupakan hasil kerja secara menyeluruh oleh organisasi melalui usaha-usaha yang sistemik didukung kemampuan organisasi dalam periode tertentu yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact* untuk mencapai kebutuhan secara efektif dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Tujuannya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan memperhatikan pada sumber daya yang

dimiliki oleh organisasi tersebut. Pengukuran/ penilaian kinerja organisasi (seperti UPK Kecamatan pada PNPM MPd) tidak terlepas dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan indikator-indikator variabel kinerja UPK yaitu produktifitas, kepuasan, kualitas layanan, responsibilitas dan keadilan. Dengan penentuan indikator kinerja tersebut akan dapat melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum. Adapun hasil distribusi responden berupa jawaban dari angket yang telah disebarkan dari masing-masing indikator variabel penelitian adalah.

Tabel 4.15 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub produktifitas.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	Y ₁	15	38,5	20	51,3	1	2,6	2	5,1	1	2,6	39	100
2.	Y ₂	10	25,6	22	56,4	6	15,4	1	2,6	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa indikator ketigapuluhdua (Y₁), ternyata sebagian besar responden (51,3%) menyatakan setuju bahwa organisasi (UPK Kecamatan) mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu pada pelaksanaan program di masyarakat, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 38,5%. Terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju yakni sebanyak 2,6%, ini menggambarkan bahwa ada ketidakmampuan organisasi untuk menghasilkan sesuatu mungkin berupa inovasi, inisiatif atau cara lain dalam pelaksanaan PNPM di masyarakat. Pada indikator ketigapuluhtiga (Y₂), menjelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (56,4%) bahwa organisasi seperti UPK Kecamatan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25,6%. Terdapat 2,6% yang menyatakan tidak setuju karena dimungkinkan kondisi sosial kultural di masyarakat.

Tabel 4.16 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub kepuasan.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	Y ₃	9	23,1	26	66,7	2	5,1	2	5,1	0	0,0	39	100
2.	Y ₄	14	35,9	23	59	2	5,1	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa indikator ketigapuluhempat (Y₃), ternyata sebagian besar responden (66,7%) menyatakan setuju bahwa adanya kemampuan organisasi (UPK Kecamatan) untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,1 %. Responden yang menyatakan netral dan tidak setuju masing masing sebanyak 5,1%, ini menggambarkan bahwa organisasi dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya melalui pelaksanaan program kegiatan. Pada indikator ketigapuluhlima (Y₄), sebagian besar responden menyatakan setuju (59%) bahwa adanya upaya dari UPK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 35,9%, sedangkan yang menyatakan netral hanya 5,1%.

Tabel 4.17 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub kualitas layanan.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	Y ₅	3	7,7	33	84,6	2	5,1	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	Y ₆	6	15,4	30	76,9	2	5,1	1	2,6	0	0,0	39	100
3	Y ₇	9	23,1	29	74,4	1	2,6	0	0,0	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator ketigapuluhenam (Y₅), ternyata sebagian besar responden (84,6%) menyatakan setuju bahwa UPK Kecamatan selalu ajeg/andal dalam memberikan informasi pelayanan pada pelaksanaan kegiatan program di masyarakat. Responen yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7,7%, dan netral sebanyak 5,1%, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6%, hal ini dimungkinkan ketidakajegan memberikan informasi dikarenakan kondisi masyarakatnya. Pada indikator ketigapuluhujuh (Y₆), sebagian besar responden menyatakan setuju (76,9%) bahwa terdapat kemampuan organisasi (UPK Kecamatan) untuk melancarkan prosedur pelayanan pada pelaksanaan PNPM MPd di masyarakat, sedangkan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15,4%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6%, hal ini dimungkinkan bahwa

ketidakmampuan dalam mempermudah atau melancarkan prosedur pelayanan karena waktu dan kondisi responden maupun masyarakatnya. Sedangkan pada indikator ketigapuluhdelapan (Y_7) sebagian responden menyatakan setuju (74,4%) bahwa adanya kemampuan UPK Kecamatan untuk memudahkan teknis layanan pelaksanaan PNPM-MPd di masyarakat. Reponden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,1%, sedangkan yang menjawab netral sebanyak 2,6%.

Tabel 4.18 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub responibilitas.

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	Y_8	10	25,6	22	56,4	6	15,4	1	2,6	0	0,0	39	100
2.	Y_9	17	43,6	19	48,7	1	2,6	1	2,6	1	2,6	39	100

Sumber: lampiran C

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indikator ketigapuluhsembilan (Y_8), ternyata sebagian besar responden (56,4%) menyatakan setuju bahwa Pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan UPK sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sudah ditetapkan organisasi. Responen yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25,6%, sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6%, hal ini dimungkinkan pelaksanaan program kegiatan di lapangan masih belum sesuai dengan prinsip administrasi. Pada indikator keempatpuluh (Y_9) dijelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (48,7%) yaitu Pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan UPK berdasarkan pada tupoksi masing-masing sesuai peraturan organisasi, hal ini didukung oleh responden yang menyatakan sangat setuju (43,6%). Responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing sebanyak 2,6%, ini membuktikan bahwa ada beberapa responden yang belum mengerti atau melaksanakan tugasnya di lapangan berdasarkan tupoksi.

Tabel 4.19 Tabulasi frekuensi tanggapan responden mengenai indikator sub keadilan

No	Item	Frekuensi Jawaban Responden										Total	(%)
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%		
1.	Y_{10}	9	23,1	22	56,4	8	20,5	0	0,0	0	0,0	39	100
2.	Y_{11}	10	25,6	21	53,8	7	17,9	1	2,6	0	0,0	39	100

Sumber: lampiran C

Pada tabel 4.19 dapat dijelaskan bahwa indikator keempatpuluhatsu (Y_{10}), ternyata sebagian besar responden (56,4%) menyatakan setuju pelayanan UPK pada pelaksanaan program dilaksanakan secara merata pada masyarakat. Responen yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,1%, sedangkan responden yang menyatakan netral sebanyak 20,5%. Pada indikator keempatpuluhdua (Y_{11}) dijelaskan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju (53,8%) yaitu

pelayanan UPK pada pelaksanaan program dilaksanakan di masyarakat telah memenuhi unsur keadilan, didukung oleh responden yang menyatakan sangat setuju (25,6%). Responden yang menyatakan netral sebanyak 17,9%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2,6%, ini membuktikan bahwa ada beberapa responden yang belum dapat melayani secara maksimal pelaksanaan program di masyarakat.

4.4 Analisa Data

Analisa data dalam pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (dalam hal ini kuisioner) melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang berlainan.

a. Uji Validitas

Melalui uji validitas dengan pendekatan *Pearson Product Moment*, maka setiap instrumen penelitian dapat diketahui valid tidaknya, hal ini dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} , dimana nilai r_{tabel} untuk responden sebanyak 39 adalah 0,316. Instrumen yang valid dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Dari hasil uji validitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap semua item pertanyaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item penelitian dapat dikatakan valid, dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.20 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas masing masing variabel

Variabel	No Item Pertanyaan	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas (X_1)	1	$X_{1,1}$	0,365	0,316	Valid
	2	$X_{1,2}$	0,473	0,316	Valid
	3	$X_{1,3}$	0,648	0,316	Valid
	4	$X_{1,4}$	0,495	0,316	Valid
	5	$X_{1,5}$	0,613	0,316	Valid
	6	$X_{1,6}$	0,480	0,316	Valid

	7	X _{1,7}	0,559	0,316	Valid
	8	X _{1,8}	0,473	0,316	Valid
	9	X _{1,9}	0,524	0,316	Valid
	10	X _{1,10}	0,379	0,316	Valid
	11	X _{1,11}	0,537	0,316	Valid
	12	X _{1,12}	0,582	0,316	Valid
	13	X _{1,13}	0,561	0,316	Valid
	14	X _{1,14}	0,604	0,316	Valid
	15	X _{1,15}	0,542	0,316	Valid
	16	X _{1,16}	0,587	0,316	Valid
	17	X _{1,17}	0,640	0,316	Valid
	18	X _{1,18}	0,549	0,316	Valid
	19	X _{1,19}	0,559	0,316	Valid
	20	X _{1,20}	0,395	0,316	Valid
	21	X _{1,21}	0,379	0,316	Valid
	22	X _{1,22}	0,564	0,316	Valid
	23	X _{2,1}	0,351	0,316	Valid
Transparansi (X ₂)	24	X _{2,2}	0,576	0,316	Valid
	25	X _{2,3}	0,622	0,316	Valid
	26	X _{2,4}	0,409	0,316	Valid
	27	X _{2,5}	0,784	0,316	Valid
	28	X _{2,6}	0,682	0,316	Valid
	29	X _{2,7}	0,775	0,316	Valid
	30	X _{2,8}	0,743	0,316	Valid
	31	X _{2,9}	0,740	0,316	Valid
Kinerja UPK (Y)	32	Y ₁	0,730	0,316	Valid
	33	Y ₂	0,443	0,316	Valid
	34	Y ₃	0,578	0,316	Valid
	35	Y ₄	0,407	0,316	Valid
	36	Y ₅	0,515	0,316	Valid
	37	Y ₆	0,550	0,316	Valid
	38	Y ₇	0,638	0,316	Valid
	39	Y ₈	0,469	0,316	Valid
	40	Y ₉	0,591	0,316	Valid
	41	Y ₁₀	0,519	0,316	Valid
	42	Y ₁₁	0,751	0,316	Valid

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2014 (Lampiran D)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen digunakan dengan pendekatan Alpha Cronbach, dengan kriteria reliabilitas yaitu $\geq 0,7$. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas sebagaimana disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.21 Rekapitulasi hasil Uji Reliabilitas masing-masing variabel

No.	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,739	Reliabel
2.	Transparansi	0,754	Reliabel
3.	Kinerja UPK	0,739	Reliabel

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2014 (Lampiran E)

Karena hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha masing-masing variabel $\geq 0,6$ maka instrumen dimensi untuk akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kinerja UPK (Y) dinyatakan reliabel.

4.5 Metode Analisis Data

Metode ini adalah salah satu upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada setiap penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik parametrik, sehingga data yang digunakan haruslah berupa nilai berskala interval, sementara data-data yang didapatkan pada penelitian ini bernilai skala ordinal. Selanjutnya agar nilai berskala ordinal dapat dioperasikan dalam metode statistik parametrik. Maka diperlukan proses transformasi dari nilai berskala ordinal menjadi nilai berskala interval, untuk itu dilakukan metode yang dikembangkan oleh *Hays* yang disebut dengan *Method Of Succesive Interval* (MSI). Dengan dilakukannya transformasi data, diharapkan data ordinal sudah menjadi data interval dan memiliki sebaran normal yang langsung bisa dilakukan analisis dengan statistik parametrik.

Hasil perhitungan metode (MSI) untuk variabel akuntabilitas, transparansi dan kinerja UPK adalah sebagai berikut.

Tabel 4.22 Hasil transformasi skala ordinal ke nilai berskala interval variabel akuntabilitas (X₁)

Skor	Item Pertanyaan										
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11
1	1.17	3.33	3.05	2.63	3.33	2.26	2.88	1.00	3.33	3.33	3.33
2	1.17	3.33	3.05	2.63	1.00	1.00	2.88	1.55	1.00	1.00	3.33
3	1.17	1.00	1.00	1.00	1.78	2.09	1.00	1.80	1.55	2.08	1.00
4	1.34	2.96	2.53	2.45	2.86	3.09	2.76	2.82	2.69	3.48	2.85
5	2.37	4.58	4.00	3.89	4.23	4.31	4.42	4.23	4.15	5.07	4.42

Skor	Item Pertanyaan										
	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	X1.18	X1.19	X1.20	X1.21	X1.22
1	3.05	1.70	3.33	3.05	2.63	3.33	2.88	2.54	3.33	2.88	2.88
2	3.05	1.70	1.00	3.05	2.63	1.00	2.88	1.00	3.33	2.88	2.88
3	1.00	1.70	1.78	1.00	1.00	1.68	1.00	1.80	1.00	1.00	1.00
4	2.53	1.00	2.90	2.49	2.35	2.82	2.57	2.64	2.85	2.61	2.36
5	4.00	2.60	4.28	3.96	3.73	4.23	4.07	3.86	4.42	4.13	3.78

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran F)

Tabel 4.23 Hasil transformasi skala ordinal ke nilai berskala interval variabel transparansi (X_2)

Skor	Item Pertanyaan									
	$X_{2,1}$	$X_{2,2}$	$X_{2,3}$	$X_{2,4}$	$X_{2,5}$	$X_{2,6}$	$X_{2,7}$	$X_{2,8}$	$X_{2,9}$	$X_{2,10}$
1	2.88	1.04	3.05	2.74	3.33	3.33	2.48	3.33	3.05	3.05
2	1.00	1.04	3.05	2.74	1.00	1.00	2.48	1.00	1.00	1.00
3	2.88	1.04	1.00	1.00	2.29	1.87	1.00	2.34	2.14	2.14
4	3.24	1.08	2.45	2.45	3.43	3.15	2.38	3.46	3.15	3.15
5	4.19	2.08	3.91	3.89	4.65	4.58	3.63	4.65	4.31	4.31

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran F)

Tabel 4.24 Hasil transformasi skala ordinal ke nilai berskala interval variabel kinerja UPK (Y)

Skor	Item Pertanyaan										
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	Y_8	Y_9	Y_{10}	Y_{11}
1	2.65	3.33	3.05	3.05	3.33	3.33	3.33	3.33	2.78	2.39	3.33
2	1.00	1.00	1.00	3.05	1.00	1.00	3.33	1.00	1.00	2.39	1.00
3	2.65	2.01	1.62	1.00	1.68	1.68	1.00	2.01	1.25	1.00	2.08
4	2.29	3.26	2.86	2.63	3.37	3.25	3.04	3.22	2.26	2.39	3.29
5	3.69	4.65	4.37	4.14	5.38	4.96	4.71	4.58	3.68	3.77	4.65

Sumber: Data primer yang diolah, 2014 (Lampiran F)

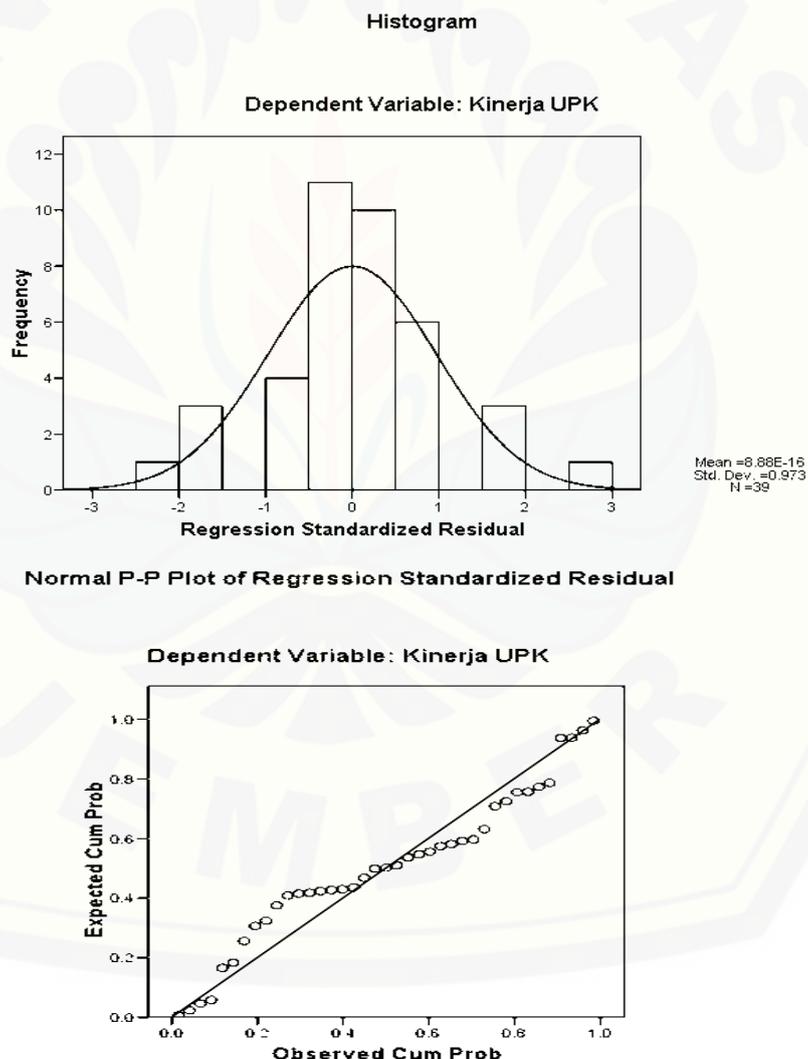
4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mengetahui normalitas residual adalah melalui analisis grafik (*Histogram* dan *Normal P-Plot*) dan analisis statistik. Pengujian normalitas yang menggunakan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan histogram, variabel dependen (Y) pada sumbu vertical, dan nilai

residual terstandarisasi pada sumbu horizontal.

Jika gambar Histogram menunjukkan kurva seperti lonceng, maka nilai residual tersebut dinyatakan normal. Sedangkan uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Normal Probability Plot (P-Plot)* yaitu dengan pendekatan grafik yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan dapat digambarkan ketika terjadi garis diagonal ke kiri bawah atau ke kanan atas. Kurva histogram dan *Normal P-Plot* pada pengujian normalitas regresi linear antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK dapat dilihat hasilnya sebagai berikut.



Gambar 4.1 Histogram dan *Normal P-Plot* (Sumber Lampiran G)

Hasil olah statistik menghasilkan gambar di atas yang menjelaskan bahwa.

- a. Pada output Histogram terlihat bahwa kurva dependen variabel (kinerja UPK) dan *regession Standardized Residual* membentuk garis pada gambar kurva menyerupai seperti lonceng, sehingga dengan hasil ini maka analisis regresi layak digunakan. Perbedaan pada tinggi rendahnya batang/*bar* terjadi karena terdapat beberapa data yang dianggap memiliki sifat berbeda dibandingkan dengan kebanyakan data lainnya atau terjadi kesenjangan data variabel Y (kinerja UPK) dengan data yang lain (variabel akuntabilitas dan transparansi) dalam kurun waktu tertentu.
- b. Normal P-P (*Plot Regression Standardized*), terlihat bahwa terdapat kumpulan titik-titik menyebar pada garis diagonal, sehingga melalui uji normalitas ini maka analisis regresi layak untuk digunakan.

Hasil penentuan distribusi normal dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.25 Hasil Perhitungan uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97332853
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.119
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.934
Asymp. Sig. (2-tailed)		.348

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data, lampiran G

Hasil hitung. *Asymp. Sig* adalah 0,348 dan lebih besar dari sig. 5% atau dengan kata lain menjelaskan bahwa $0,348 > 0,05$ sehingga dengan hasil uji ini residual berdistribusi normal maka analisis regresi layak digunakan. Untuk nilai Z-hitung (Kolmogorov-Smirnov)= 0,934 dengan memilih *level of significance* $\alpha = 0,05$ pada dua ujung wilayah kritis (*the*

two-sided critical region), Z-tabel pada tabel distribusi normal standar adalah 1,96. Oleh karena $0,934 < 1,96$ atau Z-hitung (Kolmogorov-Smirnov) $<$ Z-tabel, maka dapat dijelaskan data mengikuti distribusi normal.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antara dua variabel. Jika terjadi korelasi linier maka terdapat masalah multikolinieritas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Untuk mengamati adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai VIF-nya tidak lebih dari 10, maka model ini tidak terdapat gejala multikolinieritas. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena $VIF = 1/Tolerance$. Adapun hasil dari olah statistik pada pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Diagnostik Kolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	12.538	4.666		2.687	.011		
	Akuntabilitas	.177	.073	.348	2.430	.020	.830	1.204
	Transparansi	.394	.145	.390	2.718	.010	.830	1.204

a. Dependent Variable: Kinerja UPK

Sumber: Hasil Olah Data, lampiran G

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil perhitungan VIF adalah $1/Tolerance$ atau $=1/0,830$ sebesar 1,204. Nilai hasil tersebut di bawah 10 ($1,204 < 10$), sehingga diputuskan bahwa model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.6.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variable penelitian pada model linier regresi berganda. Jika terjadi korelasi maka model regresi tidak layak sehingga yang baik adalah apabila regresi yang terbebas dari autokorelasi. Cara yang dilakukan untuk mengetahui adanya autokorelasi maka salah satu caranya dengan menggunakan metode Durbin-Waston (D-W).

Hasil uji Durbin-Waston dengan menggunakan SPSS pada penelitian ini adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.27 Hasil Perhitungan Pengujian D-W

Model Summary^b

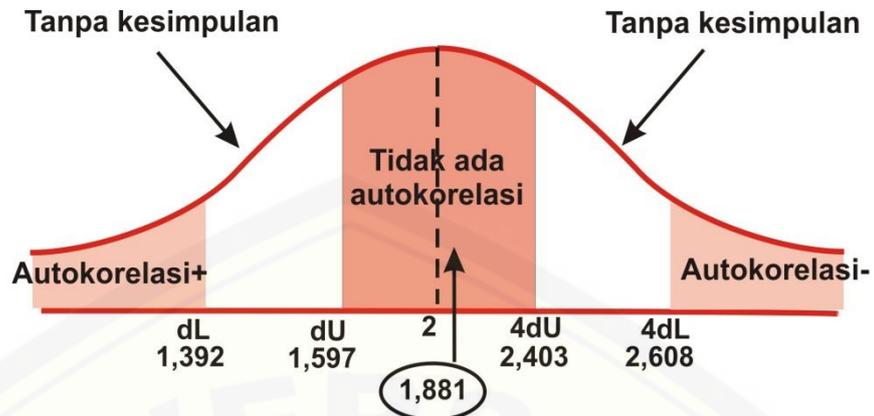
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.621 ^a	.385	.351	4.10936	1.881

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja UPK

Sumber: Hasil data yang diolah menggunakan SPSS 15.00, lampiran G

Pada tabel di atas dapat dijelaskan dari hasil Model Summary menyatakan bahwa nilai D-W sebesar 1,881. Keputusan asumsi ini dengan menggunakan 2 nilai bantu, yaitu nilai dL dan nilai dU, dengan memperhatikan bahwa penelitian menggunakan 2 variabel besas (K=2) dan n=jumlah sampel (sebanyak 39 responden). Apabila nilai D-W (1,881) berada di antara nilai dU hingga (4-dU) berarti tidak terjadi autokorelasi. Table Durbin-Waston dengan n=39 dan K=2 maka akan dapat diperoleh nilai dL = 1,392 dan nilai dU=1,597, sehingga nilai 4-dU adalah 4-1,597=2,407 sedangkan nilai 4-dL sebesar 4-1,392=2,608. Untuk mengetahui bahwa pada penelitian ini terjadi atau tidak gejala autokorelasi maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

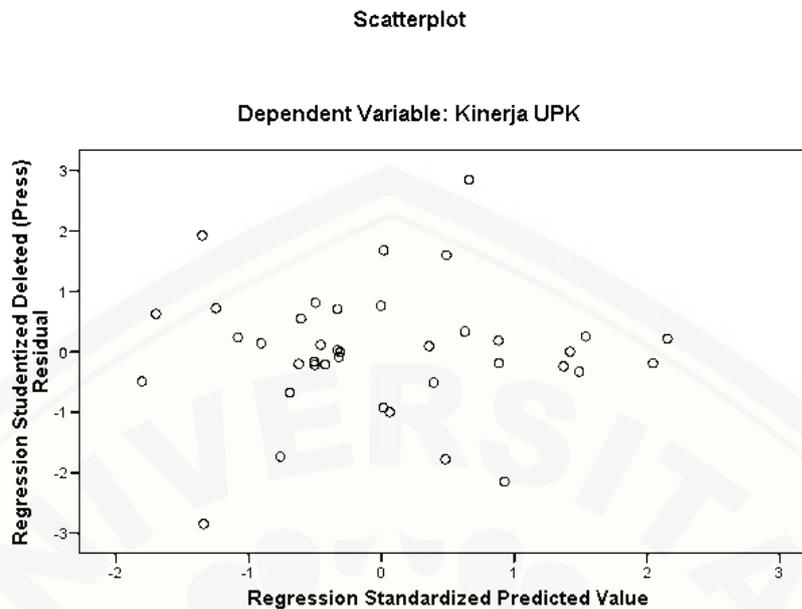


Gambar 4.2 Kriteria pengujian autokorelasi

Pada gambar di atas menyatakan bahwa nilai Durbin-Waston sebesar 1,947 terletak di antara dU (1,597) dan $4dU$ (2,403) maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.6.4 Uji Heterosdastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, apabila pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, sedangkan hasil pengamatan tersebut berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot. Apabila pada *scatterplot* terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Adapun setelah diolah melalui program SPSS pada penelitian ini maka muncul gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Hasil Olah SPSS Uji Heteroskedastisitas

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada *scatterplot* terlihat bahwa plot/titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu *Regression studentized residual*, oleh karenanya berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode analisis grafik, maka pada model regresi yang terbentuk dapat dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linear berganda berguna untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel dependen (kinerja UPK Kecamatan). Berdasarkan pengujian diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	t tabel	Sig.
Konstanta	12,538	2,687	2.023	0,011
Akuntabilitas	0,177	2,430	2.023	0,020
Transparansi	0,394	2,718	2.023	0,010

Sumber: Hasil data yang diolah menggunakan SPSS 15.00

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$[Y = 12,538 + 0,177X_1 + 0,394 X_2]$$

Interpretasi atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 12,538, menjelaskan bahwa kinerja UPK Kecamatan sebesar (+)12,538 artinya tanpa adanya variabel lainnya (akuntabilitas dan transparansi) maka kinerja UPK Kecamatan dikatakan bagus yakni positif sebesar 12,538. Nilai probabilitas konstanta sebesar 0,011 jauh di bawah tingkat signifikansi ($0,011 < 0,05$).
2. Koefisien regresi $X_1 = 0,177$ artinya variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif, dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. dengan tingkat signifikansi 0,020 ($\alpha < 0,05$). Nilai signifikan dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas akuntabilitas sebesar 0,020 di bawah tingkat signifikansi 5% ($0,020 < 0,05$) dan arah koefisien dinyatakan positif. Dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Koefisien regresi ini dapat menjelaskan jika variabel independen lain nilainya tetap, maka setiap ada satu peningkatan X_1 (variabel akuntabilitas) maka akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,177. Semakin banyak/inten/sering pelaksanaan prinsip akuntabilitas, maka semakin bagus/meningkat kinerja yang dilakukan UPK Kecamatan pada program PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas menjelaskan bahwa semakin sering kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal program, seperti dari inspektorat Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo, BPKP, satker provinsi, RMU, hingga NMC (*National Management Consultant*), tim dari World Bank International dan *World Bank Indonesia* maka akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo
3. Koefisien regresi $X_2 = 0,394$, artinya variabel transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. Pengaruh yang positif ini juga signifikan pada nilai $\alpha = 0,010$ ($\alpha <$

0,05). Nilai signifikan dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas transparansi sebesar 0,010 di bawah tingkat signifikansi 5% ($0,010 < 0,05$) dan arah koefisien dinyatakan positif. Disimpulkan bahwa variabel transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Koefisien regresi ini dapat menjelaskan jika variabel independen lain nilainya tetap, maka setiap ada satu peningkatan variabel transparansi, akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,394. Semakin banyak/sering/inten pelaksanaan prinsip transparansi di masyarakat, maka semakin bagus/meningkat kinerja yang dilakukan UPK Kecamatan pada program PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan prinsip transparansi menjelaskan bahwa semakin banyak akses informasi dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan serta program-program lainnya pada PNPM Mandiri Perdesaan yang dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas serta pihak-pihak lainnya melalui saluran elektronik, seperti media internet (pada pnpn-jatim.blogspot.com, pnpn.situbondo.blogspot.com/, dll.), dan melalui media cetak seperti Tabloid Suara Mandiri Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Situbondo serta melalui papan-papan pengumuman di tempat-tempat strategis di seluruh kelurahan/desa maka akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan pada PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo

4.8 Uji Hipotesis

1. Uji Regresi secara Simultan/Bersama-sama (*F test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan secara bersama-sama. Secara ringkas hasil uji F dapat dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 4.29 Hasil Perhitungan Uji F

<i>Dependent Variable</i>	<i>Independent Variable</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
Y	X_1, X_2	0,621	0,385	11,278	3,259	0,000

Sumber: Hasil data yang diolah menggunakan SPSS 15.00

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $df_1 (k - 1)$ dan $df_2 (n - k)$ atau $df_1=2$ dan nilai $df_2=36$. Sehingga nilai F_{tabel} adalah 3,259 dan lebih kecil daripada F_{hitung} ($3,259 < 11,278$) sedangkan nilai sig $0,000 < 0,005$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja UPK Kecamatan, atau dapat dinyatakan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Auditya, dkk. (2013) dan Garini (2011)

2. Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Adapun besarnya nilai koefisien determinasi berganda (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh keeratan/kekuatan hubungan dan besarnya prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Kecocokan model akan semakin lebih baik apabila mendekati satu. Memperhatikan hasil analisis pada Tabel 4.29 diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (*R Square*) sebesar 0,385, maksudnya tingkat keeratan atau kekuatan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,385, hal ini berarti besarnya sumbangan pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel kinerja UPK Kecamatan sebesar 38,5%. Dapat diartikan bahwa 38,5% perubahan kinerja UPK Kecamatan dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan transparansi sedangkan sisanya sebesar 61,9% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

3. Uji Parsial (*t test*)

Uji *t* digunakan untuk membuktikan apakah variabel akuntabilitas dan transparansi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kinerja UPK Kecamatan. Untuk menguji apakah hipotesis yang ditetapkan semula diterima atau ditolak, dengan cara membandingkan antara *t*

hitung dengan t tabel. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $39-2-1 = 36$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,028

Adapun perhitungan uji hipotesis menggunakan program SPSS versi 15.00 dengan hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 4.30 Hasil Uji t

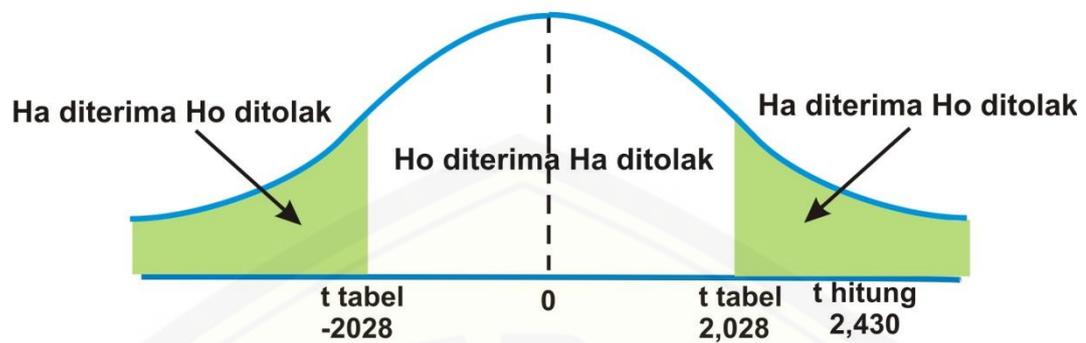
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.538	4.666		2.687	.011		
	Akuntabilitas	.177	.073	.348	2.430	.020	.830	1.204
	Transparansi	.394	.145	.390	2.718	.010	.830	1.204

a. Dependent Variable: Kinerja UPK

Berdasarkan tabel 4.30 di atas maka data tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

a. Pengujian untuk koefisien akuntabilitas

Dari hasil tabel koefisien di atas diperoleh t hitung sebesar 2,430 sedangkan t tabel dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $39-2-1 = 36$ adalah sebesar 2,028. Dalam hal ini t hitung (2,430) > t tabel (2,028), maka t hitung berada di daerah penerimaan H_a atau H_0 ditolak artinya secara parsial terdapat pengaruh dari akuntabilitas terhadap kinerja UPK. Selain itu dari tabel di atas, dapat dilihat besar *probability value* yaitu 0,020 yang berarti angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,020 < 0,05$ artinya secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. Dapat dijelaskan pada gambar kurva di bawah ini.



Gambar 4.4 Kurva hasil Uji t dua variabel akuntabilitas terhadap Kinerja UPK.

b. Pengujian untuk koefisien transparansi

Dari hasil tabel koefisien di atas diperoleh t hitung sebesar 2,718 sedangkan t tabel dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $39-2-1 = 36$ adalah sebesar 2,028. Dalam hal ini $t \text{ hitung } (2,718) > t \text{ tabel } (2,028)$, maka t hitung berada di daerah penerimaan H_a atau H_0 ditolak artinya secara parsial terdapat pengaruh dari transparansi terhadap kinerja UPK. Selain itu dari tabel di atas, dapat dilihat besar *probability value* yaitu 0,010 yang berarti angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,010 < 0,05$ artinya secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.5 Kurva hasil Uji t dua variabel transparansi terhadap Kinerja UPK

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih). Koefisien regresi $X1 = (+) 0,177$ dengan nilai signifikansi $0,020$ ($\alpha < 0,05$) artinya variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan.

Dapat disimpulkan bahwa setiap ada satu peningkatan variabel akuntabilitas maka akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar $0,177$. Dapat dijelaskan juga bahwa setiap kenaikan **variabel akuntabilitas** ($X1$) yang di dalamnya terdapat **akuntabilitas hukum dan kejujuran** (terdiri dari setiap kegiatan, penggunaan sumber dana publik untuk pelaksanaan program UPK selalu berdasarkan pada PTO, pelaksanaan program kegiatan selalu mematuhi pada peraturan organisasi serta pelaksanaan organisasi dilakukan secara sehat untuk menghindari segala penyalagunaan jabatan), **akuntabilitas manajerial** (seperti halnya setiap kegiatan organisasi selalu mengacu pada besarnya keuangan yang sudah ditentukan organisasi, aktifitas organisasi yang dicapai dilakukan dengan biaya yang minimal, hasil yang dicapai organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, adanya pertanggungjawaban apabila terjadi pembekakan keuangan dari hasil kegiatan program yang telah ditetapkan organisasi), **akuntabilitas program** (di dalamnya terdapat pelaksanaan program oleh UPK memberikan hasil yang optimal di masyarakat, UPK bertanggung jawab pada proses pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, adanya pertanggungjawaban dari UPK pada setiap kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan organisasi, strategi organisasi didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program yang dilakukan oleh UPK di masyarakat, keberhasilan pelaksanaan program oleh UPK dalam pencapaian tujuan organisasi didukung oleh program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat) dan **akuntabilitas kebijakan** (termasuk di dalamnya tentang UPK bertanggung jawab pada pelaksanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan,

setiap keputusan UPK pada setiap kegiatan selalu mempertimbangkan sasaran program, setiap keputusan UPK selalu mempertimbangkan dampak negatif hasil dari pelaksanaan program, keputusan UPK selalu mempertimbangkan manfaat dari pelaksanaan program di masyarakat) serta **akuntabilitas finansial** (terdiri dari penggunaan keuangan pada pelaksanaan program sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, penggunaan keuangan pada pelaksanaan program dilakukan secara minimal dengan hasil yang maksimal, penggunaan keuangan pada pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, adanya upaya UPK untuk menghindari penyalagunaan keuangan organisasi, pengelolaan keuangan organisasi setiap hasil kegiatan program selalu dipublikasikan kepada masyarakat) maka akan menaikkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,177.

Prinsip akuntabilitas ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal program, seperti dari inspektorat Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo, BPKP, satker provinsi, RMU, hingga NMC (*National Management Consultant*), tim dari World Bank International dan *World Bank Indonesia*.. Dengan dilaksanakannya prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban tersebut maka kinerja UPK Kecamatan dinilai semakin bagus serta dipercaya untuk mengembangkan program-program lainnya di masyarakat.

2. Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih). Koefisien regresi $X_2 = (+) 0,394$, dengan nilai signifikansi 0,010 ($\alpha < 0,05$) artinya variabel transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan. Dapat dijelaskan bahwa setiap ada satu peningkatan variabel transparansi (di dalamnya terdapat sub variabel organisasi sektor publik atau UPK Kecamatan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur dan pembiayaan pada setiap rencana dan kegiatan PNPM-MPd di masyarakat, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai rencana dan hasil kegiatan, memberikan jalan keluar jika ada kesulitan tentang pelaksanaan PNPM-MPd di masyarakat, selalu menyusun prosedur tentang tata cara pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program, setiap pengaduan tentang hasil kegiatan organisasi pada

PNPM-MPd dilakukan secara terbuka, UPK menginformasikan tentang adanya situs penyedia jasa berupa email, blog, website yang dibuat untuk sarana informasi pada PNPM-MPd. dan sarana teknologi untuk kecepatan merespon pengaduan dari masyarakat perihal kegiatan PNPM-MPd. serta organisasi melibatkan media dan lembaga lain guna penyebaran informasi tentang kegiatan PNPM-MPd.) akan meningkatkan kinerja UPK Kecamatan sebesar 0,394.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi seperti halnya mengakses informasi melalui saluran elektronik (TV), seperti media internet (Web, Blog, FB), media cetak seperti Tabloid Suara Mandiri Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Situbondo serta melalui papan-papan pengumuman dapat berpengaruh pada kinerja UPK Kecamatan pada PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo. Sehingga semakin banyak/inten/sering pelaksanaan prinsip transparansi, maka semakin akan meningkat kinerja yang dilakukan UPK Kecamatan pada program PNPM-MPd di Kabupaten Situbondo. Adanya transparansi yang di dalamnya terdapat penyediaan akses informasi yang jelas dan cepat, akan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan di masyarakat. Secara sistemik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPK Kecamatan, sehingga akan meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja bagi UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo.

3. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih) yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini adalah sebesar 38,5% dan sisanya sebesar 61,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terlibat dalam model regresi ini. Nilai sebesar 61,5% adalah nilai dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan pada PNPM-MPd di Situbondo, nilai tersebut

dapat berasal dari faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan administratif, aturan, kebijakan, budaya, sosial, ekonomi dan teknologi. Termasuk kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Dapat juga karena faktor motivasi organisasi, di dalamnya menyangkut perihal sejarah, misi, budaya, insentif atau imbalan. Faktor yang terakhir adalah karena kapasitas organisasi, di dalamnya menyangkut pada pola dan strategi kepemimpinan, sumber daya manusia, manajemen keuangan, budaya dan proses organisasi, program manajemen, infrastruktur, rantai institusional, pola tingkah laku serta pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

4. Dari hasil analisis regresi penelitian dapat diketahui bahwa variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) secara bersama-sama/simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (kinerja UPK Kecamatan). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 11,278 lebih besar daripada F tabel yakni 3,259 ($3,259 < 11,278$) dengan probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat dikatakan model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kinerja UPK Kecamatan, atau dapat dinyatakan bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo (Kecamatan Sumbermalang, Banyuglugur, Jatibanteng, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panji, Kapongan, Arjasa, Jangkar dan Banyuputih). Kedua variabel secara simultan berpengaruh pada kinerja UPK Kecamatan, hal ini menunjukkan bahwa segala hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd dipertanggungjawabkan oleh UPK Kecamatan kepada pihak pemberi amanah serta dinformasikan secara terbuka kepada masyarakat maupun pihak yang terkait lainnya sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap PNPM-MPd, terbukti bahwa jumlah pemanfaat pada program ini semakin bertambah, termasuk juga beberapa UPK Kecamatan yang mendapatkan penghargaan dengan nilai A, hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPK Kecamatan di Kabupaten Situbondo semakin bagus.

5.2 Saran-Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi instansi dan organisasi sektor publik
 - a. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan, oleh karena itu disarankan hendaknya instansi yang menjadi *leading sector*-nya (dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Pemerintah Kabupaten Situbondo) dan PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan) serta Fasilitator Kabupaten (Faskab) hendaknya memberikan kesempatan kepada pengurus UPK Kecamatan pada PNPM MPd (di dalamnya unsur ketua, sekretaris dan bendaharan) untuk meningkatkan kualitas kerja di lapang atau di masyarakat khususnya pada pemberdayaan masyarakat melalui jenjang pelatihan-pelatihan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan seringnya mengikuti kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, workshop dan lain sebagainya yang akan mendorong *mind set*, perilaku dan kebiasaan pada setiap pengurus UPK Kecamatan di Situbondo sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas seperti pada hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Dengan terlaksananya tata pengelolaan yang baik, maka akan berhasil pula kinerja UPK Kecamatan di masyarakat khususnya pada pengurangan jumlah kemiskinan melalui pola pemberdayaan masyarakat
 - b. Hasil penelitian membuktikan bahwa transparansi yang mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UPK Kecamatan, oleh karena itu disarankan hendaknya Pemerintah Kabupaten khususnya pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kabupaten Situbondo harus selalu memperhatikan kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan unsur transparansi seperti adanya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, pembiayaan pada setiap

rencana dan kegiatan PNPM-MPd di masyarakat, adanya sarana kemudahan akses informasi, adanya cara dan media dalam penyusunan mekanisme pengaduan serta adanya upaya untuk meningkatkan arus informasi.

- c. Dari penelitian ini menghasilkan **implikasi kebijakan**, bahwa hendaknya program-program pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) atau program pemerintah lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hendaknya harus tetap diselenggarakan, dengan selalu mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance*, di antaranya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Terlepas dari kepentingan kekuasaan politik, hendaknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sebaiknya perlu untuk dipertahankan dengan mengingat pada kelompok pemanfaat yang semakin banyak, didukung lagi bahwa program ini menyentuh pada kepentingan masyarakat desa secara merata.
- d. Hasil penelitian ini mempunyai **implikasi teoritik**, yakni sesuai dan mendukung/menguatkan teori dan temuan penelitian-penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja, khususnya pada kinerja UPK Kecamatan pada PNPM Mandiri Perdesaan (PNM-MPd) di Kabupaten Situbondo. LAN dan BPKP (modul 1, 2000:35) menjelaskan bahwa akuntabilitas yang efektif jika memiliki sistem manajemen untuk menilai kinerja organisasi. Muhammad (dalam Sutedjo, 2009:32) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja. Temuan dalam penelitian ini juga mendukung/memperkuat temuan penelitian Ratias (2010) dan Manurung (2012) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja, khususnya pada kinerja organisasi. Hasil penelitian ini juga menguatkan atau mendukung dua variabel yakni pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja, seperti temuan Auditya, dkk. (2013) menyatakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Propinsi Bengkulu. Selain itu, Garini (2011) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas di Kota Bandung.

2. Bagi peneliti lain

- a. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dan transparansi hanya mampu menjelaskan kinerja UPK Kecamatan sebesar 38,5%, sedangkan sisanya sebesar 61,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang diteliti, oleh karena itu bagi penelitian lain yang hendak melakukan penelitian dengan tema sejenis disarankan untuk menambah variabel lain yang diduga mampu menjelaskan tentang kinerja seperti halnya efektifitas, efisiensi, responsifitas, keadaptasian, kelangsungan hidup dan empati.
- b. Apabila dimungkinkan, disarankan untuk menambah jumlah sampel agar mampu meningkatkan keterwakilan, sehingga dapat diperoleh temuan penelitian yang mudah untuk digeneralisasi, mengingat jumlah sampel yang peneliti lakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah terbatas hanya pada pelaku UPK Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk selanjutnya peneliti lain dapat melibatkan pelaku-pelaku lain pada program tersebut.

DAFTAR BACAAN**BUKU:**

- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. ed. Alisyahbana. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Aminuddin. 2008. *Semantik Pengantar Studi Tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, dkk., Agus. 2013. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada Press.
- Faustino, Cardoso Gomes. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21, Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamid, Muhammad. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Herjanto, Eddy. 2008. *Manajemen Operasi (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Grasindo.
- Ismiarti. 2013. *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE Unib.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Krina P., Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip, Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lusthaus, Charles. et. al.1999. *Enhancing Organizational Performance: A Toolbox for Self-assessment*. Canada: International Development Research Centre.
- Mangkunegara, A.Anwar Prabu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Morissan. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Narimawati, Umi. 2011. *Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Bekasi: Genesis.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Third Edition. USA: A Viacom Company
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Indeks
- Perwirosetono, Suryadi. 2001. *Model Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, Asia dan Timur Jauh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Ratminto dan Atik. 2013. *Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Character dan Penerapan Standar Minimal*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduwan dan Engkos Ahmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta
- Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta
- Robbin. 1994. *Teori Organisasi*. Jakarta: Arcan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Edisi 4. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Simamora, Henry. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3. Jakarta : STIE YKPN
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for Windows*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suliyanto, 2011, *Ekonometrika Terapan, Teori dan Aplikasi*, Jogjakarta: Andi

- Turner, Mark and Hulme, David, 1997, *Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Umar, Husein. 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.
- Werimon, dkk, 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2004, *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta : YPAPI,
- Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). 2004. *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI.

JURNAL

- Auditya, Lucy, Husaini, Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*. Volume 3, Nomor : 21-41. ISSN 2303-0348.
- Manurung, Daniel T.H. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH)*. Volume 2 No 1. ISSN 2089-3310. Singaraja,
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2. No. 1.
- Praytino. 2010. Peranan Analisa Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajemen*. Volume 2 No 1. Unnur Bandung
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurusan Ekonomi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 2. No. 2: 138–150. Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Petra.
- Sripeni, Rusbiyanti. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Koperasi Karyawan Usaha Bhakti. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Volume 2. Nomor 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka. Madiun

- Soedjono. 2005. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan Pada Terminal Penumpang Umum di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 7, No. 1.
- Widodo, Agung. 2002. Program Pengembangan Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penguatatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal. *Jurnal Analisis Sosia*. Vol.7. No. 2. AKATIGA.
- Sukidjo. 2009. Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri, Universitas Negeri Yogyakarta, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Juni, Tahun XXVIII, No. 2. FISE

HASIL PENELITIAN

- Marniati. 2010. Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Karyawan di Bagian Administrasi Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, (Tesis), Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nining Ade Ningsih, Indar, Amran Razak. 2011. Analisis Hubungan Prinsip Prinsip Good Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
- Garnita, Nita. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik). Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama. Bandung
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
- Rolla Surbakti. 2010, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja SDM pada PTPN II (Persero) Tanjung Morawa. Tesis, Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sutedjo. 2009. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Toha, Suherman. 2007. Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

MODUL DAN PERATURAN

LAN dan BPKP. 2000, Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP). Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN

Modul pelatihan implementasi Undang-undang No 14 tahun 2008

SK Bupati No.188/443/P/006.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014. Tentang Unit Pengelola kegiatan (UPK), Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Situbondo Tahun 2014.

UU RI No14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

WEB:

Annisaningrum. 2010. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*. <http://ovy19.wordpress.com>. [diakses 14 Mei 2013].

<http://piusprasetyo.wordpress.com/good-governance-menanggulangi-kemiskinan/>

<http://pemberdaya-masyarakat.blogspot.com/2012/06/dampak-audit-di-kecamatan-banyuputih.html>

<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/.../Tulisan-hukum-PNPM-Mandiri2.pdf>, hal: 21

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/60d182e4802437b37c48c96f1461b342.pdf>.

<http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/119-perkembangan-ekonomi-terkini-2013-ii>

(<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79dfd9f9305b81298296201a5c4bdb0c8cc0f4caced8e59c4c560>)

<http://www.surabayapagi.com/index.php?read~DPRD-Acungi-Jempol-Turunnya-Penduduk-Miskin;3b1ca0a43b79bfd9f9305b8129829625323ea8c06c10547522f9e4d79c1332c>

<http://pemberdaya-masyarakat.blogspot.com/2011/06/spp-desa-sumberanyar-berakit-rakit-ke.html>

www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=21

<https://www.facebook.com/Telaga.Mutiara.102/posts/438847939526185>.

http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=324)

BUKU PENDUKUNG

Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo, BPMP Situbondo: 2012.

Profil PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Situbondo, BPMP Situbondo: 2012.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. PTO. Petunjuk Teknis Operasional. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Penjelasan. Petunjuk Teknis Operasional. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002.